



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

2022

Jalan Raya Parung KM.22-23 Bojongsari, Depok 16516
Telp. (021) 7431270; Fax. (0251) 8616332; 8618252



<https://bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id>



bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id



[bbppmpvbispar.kemdikbud](https://www.facebook.com/bppmpvbispar.kemdikbud)



[@bbppmpv_bispar](https://twitter.com/bppmpv_bispar)



[@bbppmpvbispar.kemdikbud](https://www.instagram.com/bppmpvbispar.kemdikbud)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata tahun 2022. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum Balai Besar

Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata pada tahun 2022

Depok, Januari 2023

*Kepala
BBP-MPV Bisnis dan Pariwisata*



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 196405021993031002

DAFTAR ISI

HAL	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	Iii
BAB I	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	4
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU-ISU STRATEGIS	8
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lembar Pernyataan Telah Direviu	67
Perjanjian Kinerja	
Lembar Pernyataan Telah Direviu	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, 2 sasaran kegiatan dengan 5 indikator kinerja kegiatan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

[SK 1]

Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

[IKK 1.1]

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

[IKK 1.2]

Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

[IKK 1.3]

Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

[SK 2]

Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

[IKK 2.1]

Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

[IKK 2.2]

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REAL	%	TAHUN 2024	%
1	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	3020	3215	106.46	9456	33.99
2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811	1181	145.62	2718	43.45
3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	2	100	9	22.22
4	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	A	100	A	100
5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93.50	95.99	102.66	93.50	102.66

Perbandingan capaian kinerja 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra 2024 tidak dapat disandingkan dengan Capaian Kinerja 2021 disebabkan karena Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2021 dan 2022 berbeda.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 92.467.844.606,- atau mencapai 99,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 92.563.370.000,-



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara lain :

1	Revisi Anggaran di Tingkat Unit Utama Baik Blokir AA, Kelebihan dan kekurangan Belanja Pegawai pada satker dibawah Ditjen Pendidikan Vokasi, Revisi Penambahan Target dan Anggaran BA-BUN mengakibatkan perlu dilakukan penjadwalan baru
2	Keterlambatan Pedoman dan Juknis dari Pusat serta Perubahan program kegiatan penjaminan mutu menjadi perencanaan berbasis data.
3	Sekolah mengalami kesulitan melakukan MoU dengan Industri

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan antara lain :

1	MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN UNIT UTAMA, BIRO PERENCANAAN DAN DIRJEN ANGGARAN UNTUK MELAKUKAN REVISI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
2	Berkoordinasi dengan unit terkait, melakukan penjadwalan kegiatan dan persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan strategi diklat yang diambil
3	Sebagai Penyelenggara memfasilitasi peserta melakukan MoU/PKS dengan industri tempat magang peserta dan melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak tersebut melalui Rakortek

BAB I PENDAHULUAN

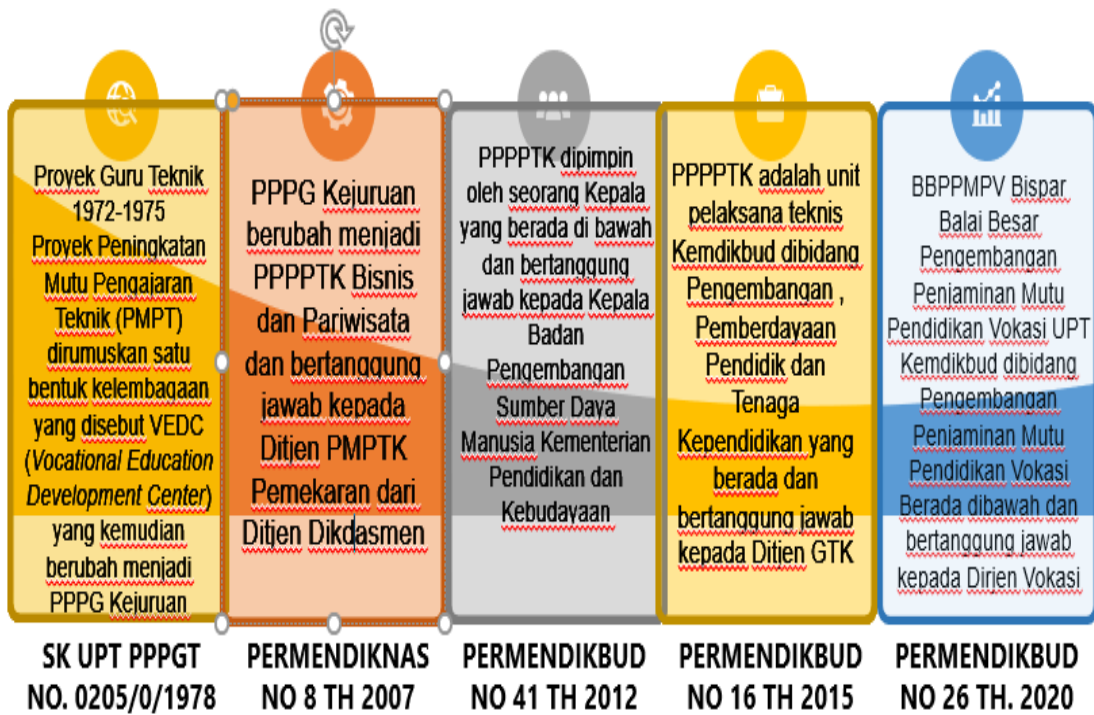
A. Gambaran Umum

Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dibawah Ditjen Pendidikan Vokasi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) Berikut sejarah perjalanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sejak Tahun 1978 sampai dengan sekarang :



Perubahan OTK

TTUC/VEDC/P3GK/P4TK BISNIS DAN PARIWISATA/BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA



DAFTAR PIMPINAN PPPG KEJURUAN / PPPPTK / BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA



Drs. Suradjiman



Ir. Winnetou Nowawi



Ir. Sartono, MM.



Drs. Andono



Drs. Suwondo MS, MM., M.Si.

PPPG KEJURUAN

1978 - 1984

1984 - 1997

1997 - 2002

2002 - 2006

2006 - 2007



Drs. Suwondo MS, MM., M.Si.



Dr. Murtoyo, MM



Dr. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd



Sabli, S.H, M.H

PPPPTK / BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA

2007 - 2009

2011 - 2015

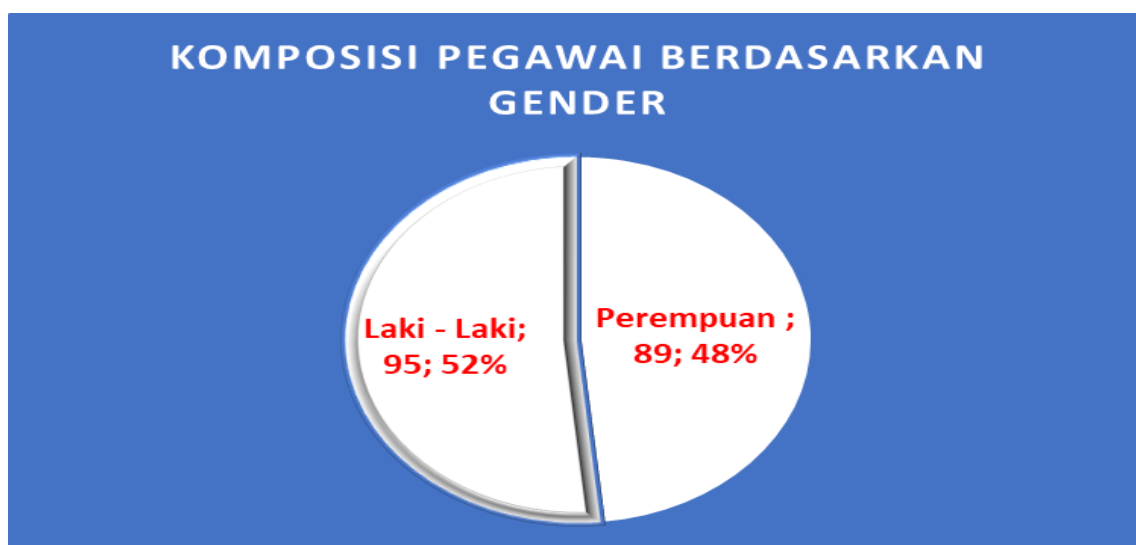
2015 - 2019

2019 - SKRG

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah unit organisasi setingkat eselon II, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen Pendidikan Vokasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata didukung oleh 184 orang pegawai PNS dengan rincian sebagai berikut :

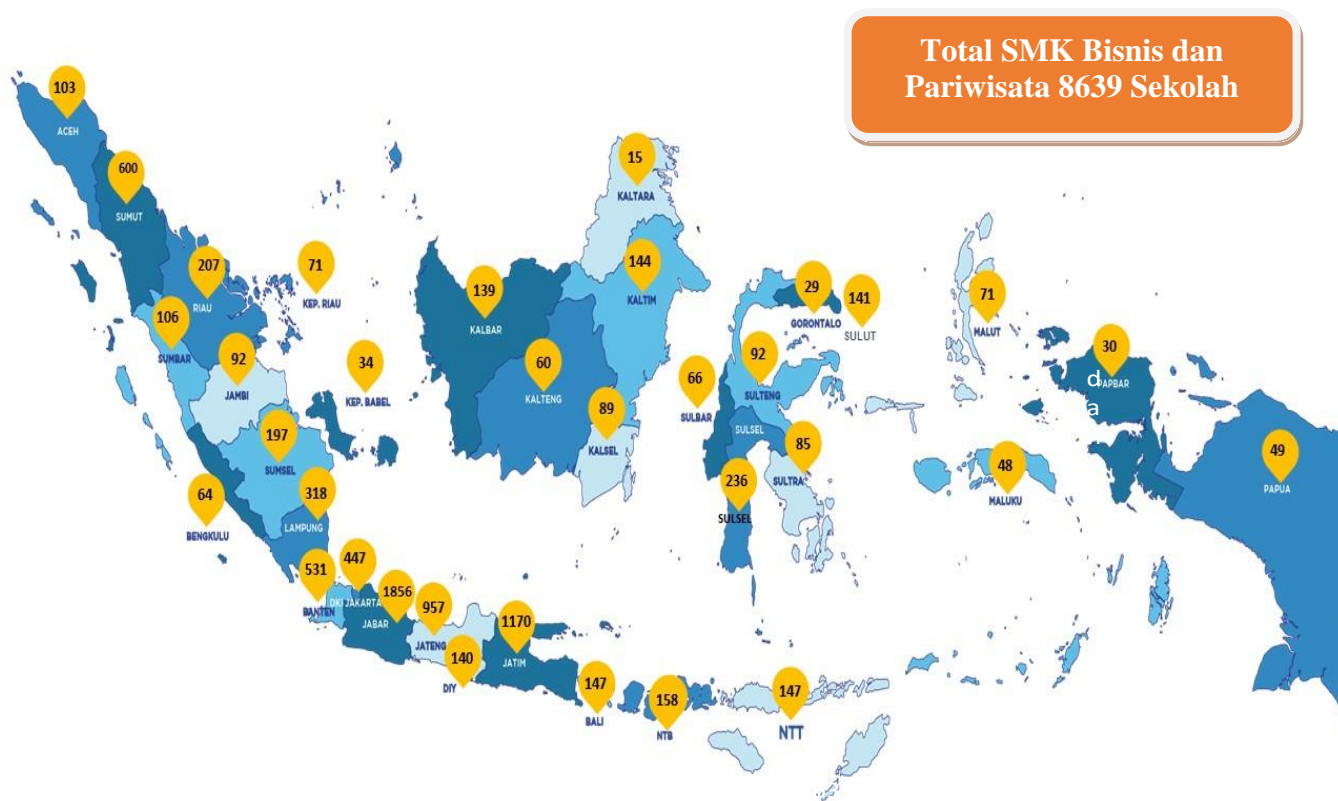
Tabel. Komposisi Pegawai Januari 2023

NO	PANGKAT/GOL RUANG		JML	J. KEL		PEGAWAI						PENDIDIKAN						
	PANGKAT	GOL. RUANG		L	P	STRK	JFT	WI	FU	PTP	DOKTER	S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Utama	IV/e																
2	Pembina Utama Madya	IV/d	2	2				2					2					
3	Pembina Utama Muda	IV/c	5	3	2	1		4				5						
4	Pembina Tk. I	IV/b	7	3	4		1	6				4	3					
5	Pembina	IV/a	28	13	15	1	3	13	10		1	1	26	1				
6	Penata Tk. I	III/d	42	16	26		2	15	25				17	25				
7	Penata	III/c	22	9	13		11	10		1			10	10	2			
8	Penata Muda Tk. I	III/b	38	20	18			3	32	3			2	14	1	21		
9	Penata Muda	III/a	15	11	4		1		14					7		8		
10	Pengatur Tk. I	II/d	6	6					6							6		
11	Pengatur	II/c	6	3	3				6						1	5		
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3	3					3							1	2	
13	Pengatur Muda	II/a	6	5	1				6								6	
14	Juru Tk. I	I/d	2	2					2								2	
15	Juru	I/c	1	1					1									1
16	Juru Muda Tk. I	I/b	1	1					1									1
17	Juru Muda	I/a																
SUB TOTAL			184	95	89	2	18	53	106	4	1	5	65	57	4	41	10	2
JUMLAH TOTAL				184					184					184				



BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berkedudukan di Kota Depok Jawa Barat dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya

bidang Bisnis dan Pariwisata yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber Data Aplikasi Penjaminan Mutu (APM), Direktorat SMK, per 25 Desember 2021

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendikbud;
10. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020- Tahun 2024;
12. Rencana Strategis PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata Tahun 2020 – 2024;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata Nomor: SP DIPA-023-18.2.352673/2022 Tanggal 17 November 2021

C. Tugas Pokok dan Fungsi

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya sedangkan fungsinya adalah :

- Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
- pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

- pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
- pengelolaan data dan informasi;
- pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
- pelaksanaan urusan administrasi. (Pasal 11)

Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata



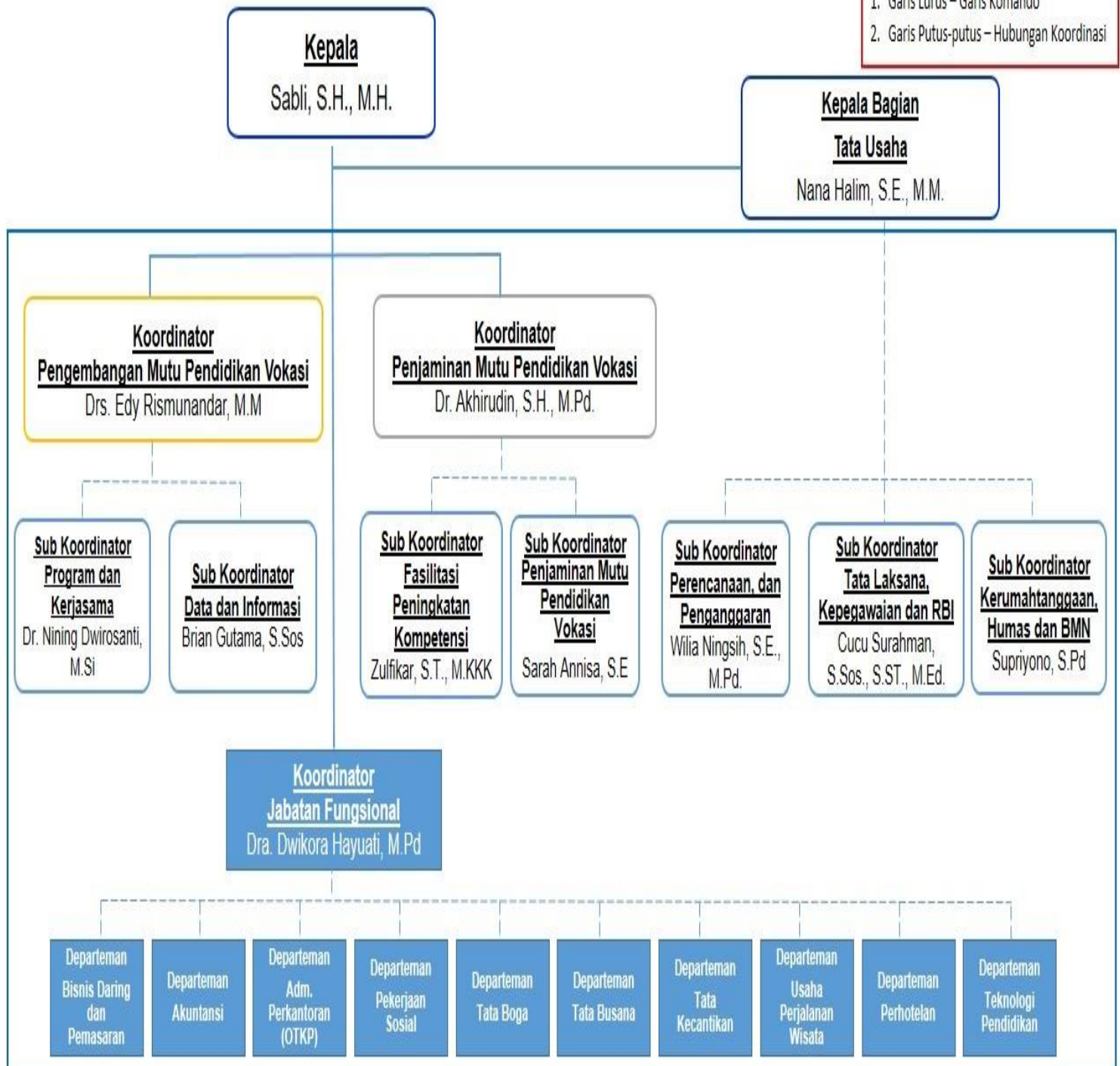
Tabel Struktur Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

STRUKTUR ORGANISASI BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2020

(Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang OTK UPT Kemendikbud)

Keterangan.

1. Garis Lurus – Garis Komando
2. Garis Putus-putus – Hubungan Koordinasi



D. Isu-Isu Strategis

A. Paradigma Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi

B. Pendidikan Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri

Saat ini paradigma tersebut telah bergeser dengan dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu seorang peserta didik baik di SMK/Kursus/ Pelatihan/Perguruan Tinggi Vokasi mengikuti proses pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur/Dosen) harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan.

C. Kebijakan Pendidikan Vokasi

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

**"Menjadi Pusat Keunggulan untuk Pendidikan Kejuruan
Bidang Bisnis dan Pariwisata yang Berkarakter Pancasila dan
bertaraf Internasional"**

Visi tersebut mengandung makna dan cerminan sebagai berikut:

- a. **Pusat Keunggulan.** Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) mengandung makna dan mencerminkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah lembaga yang memiliki keunggulan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga secara kreatif dan inovatif bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Keunggulan dimaksud dapat dijadikan inspirasi dan rujukan bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SMK Bisnis dan Pariwisata;
- b. **Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter Pancasila.** Pendidikan Kejuruan yang berkarakter mengandung makna dan mencerminkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendorong, memotivasi, dan menginspirasi SMK Bisnis dan Pariwisata (termasuk Kesehatan dan Pekerjaan Sosial) untuk memahami pluralitas sosial dan keberagaman budaya, membentuk wawasan kebangsaan, budaya riset, inovasi, budaya produksi, tangguh melestarikan warisan budaya, apresiasi terhadap keragaman seni, dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- c. **Bertaraf Internasional.** Bertaraf internasional mengandung makna dan mencerminkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengacu dan berpegang pada ketentuan-ketentuan patokan baku ISO yang berlaku secara internasional, serta trend atau kecenderungan yang berkembang secara internasional. ***Think Globally and Act Locally.***

B. Misi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di bidang Bisnis dan Pariwisata, serta Entrepreneurship;
2. Melaksanakan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi di bidang Bisnis dan Pariwisata;
3. Melaksanakan Teaching Factory untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan industri;
4. Berperan aktif dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang Bisnis dan Pariwisata.

C. Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Untuk merealisasikan visi dan misi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dan berpedoman pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, maka BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel. Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

KODE	TUJUAN BBPPMPV BISPAR
T 1	Pelaksanaan Penjaminan mutu pendidikan vokasi melalui pembinaan , bimbingan, pendampingan, supervisi, dan konsultasi langsung pada SMK Bispar (T 1)
T 2	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bispar yang berkualitas dan berstandar industri melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi (T 2)
T 3	Pelaksanaan Kerjasama di bidang Pengembangan Model Pendidikan Vokasi (SMK) Bispar dan Pelaksanaan Penyelarasan Pendidikan Vokasi dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (T 3)
T 4	Peningkatan sistem tata Kelola tata kelola satuan kerja dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik (TS 4)

D. Sasaran, Indikator dan Target BBPMPV Bisnis dan Pariwisata

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata menetapkan sasaran, indikator dan target antara lain :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET RENSTRA		
		2022	2023	2024
SK. 1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	IKK 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2215	2437	2680
	IKK 1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811	893	981
	IKK 1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	2	2
SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	A	A
	IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93.50	93.50	93.50

Pada Tahun 2022 PK awal direvisi pada akhir Bulan Desember 2022 menjadi PK Akhir, Ada Perubahan sasaran kinerja dengan penambahan anggaran dan target dana BA-BUN terutama pada IKK 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Pada IKK Ini bertambah sasaran kinerja BA – BUN sebanyak 805 Orang menjadi 3020 Orang dari 2215 Orang namun pada PK Revisi Tahun 2022 sasarannya tidak bisa dirubah pada Aplikasi Spsikita menu PK Revisi dikarenakan sudah dikunci pada Aplikasi Spasikita. Untuk merubah syarat dan ketentuan harus bersurat kepada unit utama dalam hal ini Ditjen Pendidikan dan Vokasi. Dikarenakan waktu yang singkat direntang waktu 26 s,d 28 Desember 2022 maka Satker BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memilih tidak bersurat namun akan di jelaskan di LAKIN 2022. Selain itu pada PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 ada perbedaan total anggaran dimana pada PK Revisi Tahun 2022 ada penambahan anggaran dibanding PK Awal Tahun 2022.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Awal dan PK Revisi Tahun 2022 :



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabli

Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wikan Sakarinto

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi selaku

atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Pariwisata**

Kepala BBPPMPV Bisnis dan



Wikan Sakarinto



Sabli

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2215
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93,50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 21.274.148.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 49.141.884.000
		TOTAL	Rp. 70.416.032.000

Depok, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Pariwisata**

Kepala BBPPMPV Bisnis dan



Wikan Sakarinto



Sabli



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabli

Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yulianti

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi selaku

atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 28 Desember 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Pariwisata**

Kepala BBPPMPV Bisnis dan



Kiki Yulianti



Sabli

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2215
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93,50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 50.651.307.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 41.912.063.000
		TOTAL	Rp. 92.563.370.000

Depok, 28 Desember 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Pariwisata**

Kepala BBPPMPV Bisnis dan



Kiki Yulianti



Sabli

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan, berikut informasi tingkat ketercapaiannya sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
SK. 1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	IKK 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	3020	3215	106.46
	IKK 1.2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811	1181	145.62
	IKK 1.3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	2	100
SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A	A	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	%
	IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93.50	95.99	102.66

Dari setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan diatas secara umum BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tahun 2022 realisasi dari target yang ditetapkan pada PK Tahun 2022 terealisasi dengan baik bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut akan dijelaskan ketercapaian dari **Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi** dengan 3 (tiga) IKK yang mendukung pada Tahun 2022 :

1. IKK. 1.1

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			TARGET AKHIR RENSTRA	
	TARGET	REAL	%	TAHUN 2024	%
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	3020	3215	106.46	9456	33.99

Perbandingan capaian kinerja 2022 dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra serta Capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, dikarenakan IKK.1.1 Tahun 2022 merupakan IKK baru yang berbeda dengan IKK.1.1 Tahun 2021 dimana pada Tahun 2022 perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dengan IKK pada Tahun 2021

Berikut disajikan Definisi Operasional untuk **IKK. 1.1 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja beserta metode perhitungannya.**

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi
IKK	:	2.6.4.2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja
Definisi:		

Lingkup pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1. pendidik satuan pendidikan vokasi adalah guru SMK, Dosen PTV, dan Instruktur Kursus dan Pelatihan; dan
2. Tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi adalah Pimpinan PTV, Kepala Sekolah, Pengelola LKP, pengawas, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP).

Metode Penghitungan:

$$I = A + B + C + D$$

Keterangan:

- I = Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan penyelarasan dengan kebutuhan dunia kerja
- A = Guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja
- B = Guru, Kepala Sekolah, pengawas, teknisi, laboran, instruktur dan tenaga administrasi lainnya yang mengikuti *Upskilling* dan *Reskilling* Berstandar Industri
- C = Dosen yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Berbasis Kerjasama Industri
- D = Instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan

Satuan	:	Orang
--------	---	-------

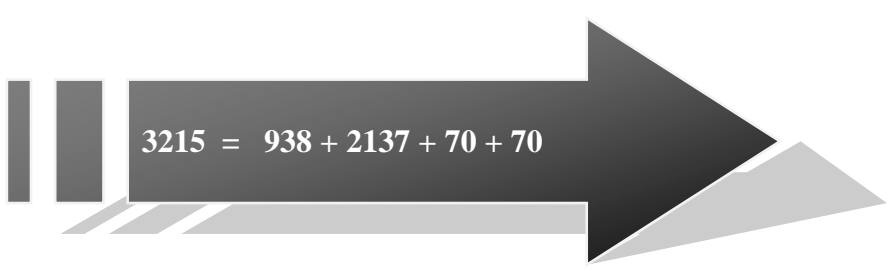
$$I = 3215$$

$$A = 938$$

$$B = 2137$$

$$C = 70$$

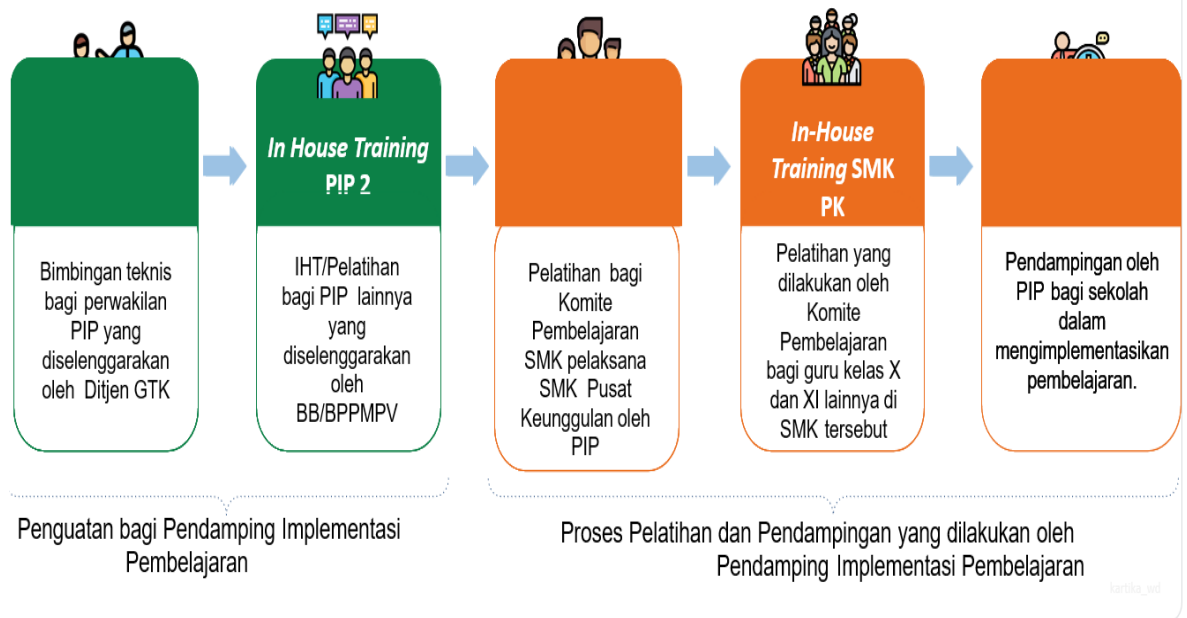
$$D = 70$$


$$3215 = 938 + 2137 + 70 + 70$$

Ada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IKK ini antara lain :

1) KEGIATAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN

Alur Kegiatan PIP



Rekapitulasi
Sasaran Peserta
Pendampingan implementasi
pembelajaran (PIP)
Tahun 2022

Sasaran Peserta SMK PK

- Pengawas Sekolah
- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
- Guru Kejuruan (2 orang)
- Guru BK
- Guru Umum

Provinsi	Jumlah Sekolah	Sasaran SMK	Jumlah Peserta
DKI Jakarta	38	7	266
Kalimantan Utara	9	7	63
Kalimantan Tengah	5	7	35
Kalimantan Barat	28	7	196
Kalimantan Timur	37	7	259
Kalimantan Selatan	17	7	119
Jumlah	134		938

2) KEGIATAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS, TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENGIKUTI UPSKILLING DAN RESKILLING BERSTANDAR INDUSTRI.

A. Diklat **Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan** (daring) 19 Juli s.d. 18 Agustus 2022

Bidang Keahlian	Sasaran	Realisasi
Pekerjaan Sosial	20	20
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	120	120
Bisnis Daring dan Pemasaran	160	160
Akuntansi	120	120
Akomodasi Perhotelan	140	140
Tata Busana	100	100
Tata Kecantikan	20	20
Tata Boga	160	160
Usaha Perjalanan Wisata	40	40
Jumlah	880	880



B. Realisasi Peserta Diklat PTK

Bidang Bisnis dan Manajemen

Bidang Keahlian	Sasaran	Realisasi	Persentase
Akuntansi	40	40	100 %
Bisnis Daring dan Pemasaran	60	60	100 %
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	40	40	100 %

Tenaga Kependidikan

Bidang Keahlian	Sasaran	Realisasi	Persentase
Manajerial Kepala Sekolah	100	100	100 %
Manajerial Pengawas Sekolah	20	20	100 %
Ketatausahaan	20	20	100 %
Dosen Vokasi	20	20	100 %
Instruktur LKP	20	20	100 %

Bidang Pariwisata dan Kesehatan

Bidang Keahlian	Sasaran	Realisasi	Persentase
Akomodasi Perhotelan	60	60	100 %
Tata Kecantikan	20	20	100 %
Tata Busana	40	40	100 %
Tata Boga	80	80	100 %
Usaha Perjalanan Wisata	20	20	100 %
Pekerjaan Sosial	20	20	100 %

Peserta yang mengikuti dan **LULUS** serta mendapatkan **SERTIFIKAT** pada kegiatan Peningkatan **Kompetensi PTK** sebanyak **580** orang

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan PTK Tahun 2022



C. Sasaran Up Skilling dan Re Skilling 8 Agustus s.d. 30 September 2022

**Dosen, Instruktur LKP,
Kepala Sekolah dan guru
mata pelajaran muatan
produktif/kejuruan untuk
bidang prioritas
TOTAL 817 Orang**

Diklat UpreSkilling Dosen Vokasi,
sebanyak : 50 orang

01

Diklat UpreSkilling LKP Vokasi,
sebanyak : 50 orang

02

Diklat UpreSkilling KS Vokasi,
sebanyak : 132 orang

03

Diklat UpreSkilling Guru Vokasi,
sebanyak : 585 orang

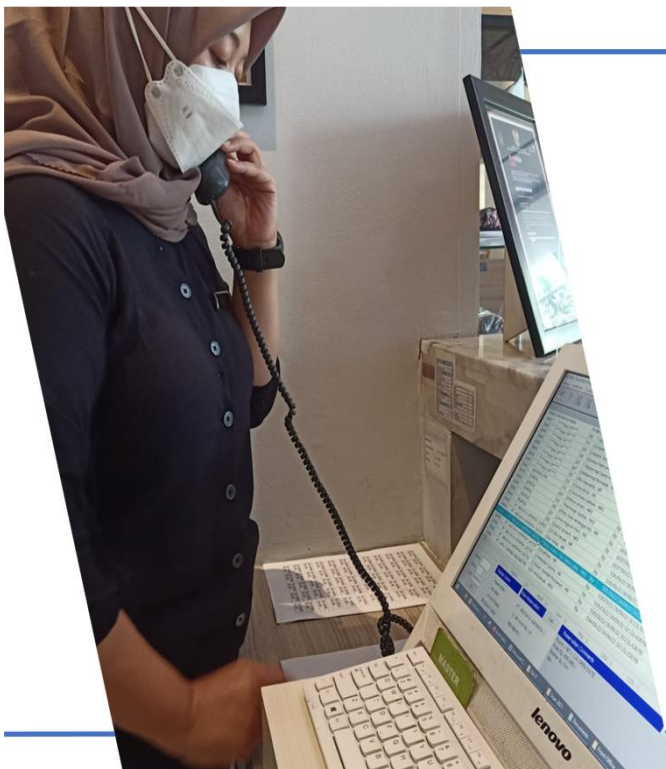
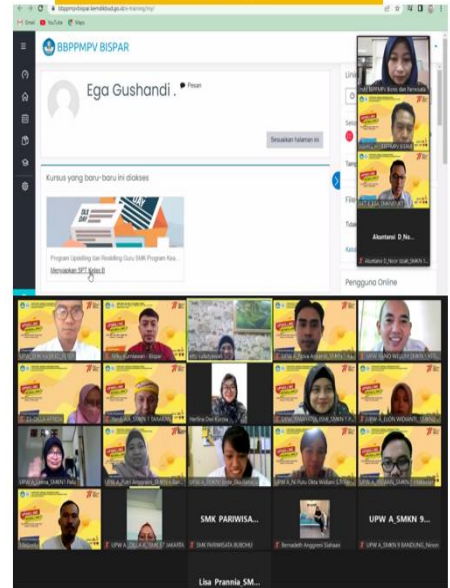
04

dokumentasi kegiatan UpReskilling BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Persiapan dan pembukaan



Orientasi



PERHOTELAN DOKUMENTASI

SMKN 3 Pekanbaru

Jl. Dr. Sutomo No.110, Suka Mulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau

SMKN 6 Yogyakarta

Jl. Kenari No.4, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

SMKN 3 Denpasar

Jl. Tirtanadi No.19, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

SMKN 3 Pekanbaru

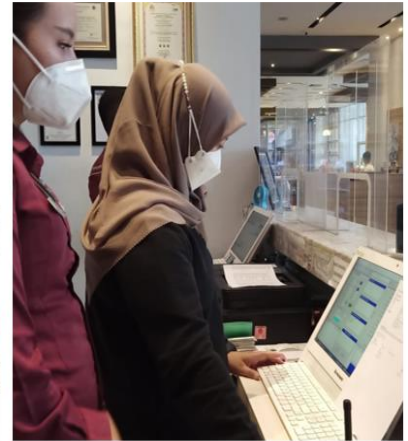
- Industri**
- Novotel Hotel
 - Batiqa Hotel
 - Ayola First Point Hotel
 - Fox Harris Hotel

SMKN 6 Yogyakarta

- Industri**
- Grand Tjokro Yogyakarta
 - The Jayakarta Hotel & Spa
 - Gallery Prawirotaman Hotel
 - Grand Rohan Jogja

SMKN 3 Denpasar

- Industri**
- Mercure Bali Sanur Resort
 - Novotel Airport Ngurah Rai Airport
 - Mercure Kuta Beach Bali
 - Mercure Bali Nusa Dua
 - Prime Plaza Hotel Sanur
 - Grand Palace Hotel Sanur Bali
 - Sudamala Suite & Villas Sanur
 - The IOI Sanur Bali



SMKN 6 Semarang

Jl. Sidodadi Barat No.8, Karangturi, Kec. Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

SMKN 3 Malang

Jl. Surabaya No.1, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

BUSANA
DOKUMENTASI



B O G A DOKUMENTASI

SMKN 9 Padang

Jl. Bundo Kandung No.18, Kp. Pd., Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat

SMKN 6 Palembang

Jl. Mayor Ruslan, Duku, Kecamatan Ilir Timur. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan

SMKN 6 Yogyakarta

Jl. Kenari No.4, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

SMKN 8 Surabaya

Jl. Kamboja No.18, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur



PEKSOS DOKUMENTASI

- Perwakilan BKKBN Provinsi Ambon
- Pos Pelayanan Terpadu Lansia Kelurahan Lateri
- Panti Sosial Trsna Werdha (PSTW) Inakaka Passo Ambon
- Yayasan Pengembangan Alam, Lingkungan dan Manusia

Industri





KECANTIKAN DOKUMENTASI

SMKN 3 Magelang

Jl. Pierre Tendean No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah

Industri

- Infinity Clinic
- Fidela Rumah Cantiq Salon & Spa
- The Beauty Recipe
- ENS Skin Specialist



OTKP DOKUMENTASI

SMKN 1 Sabang

Jl. Baypass, Cot Ba'u, Sukajaya, Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh

SMKN 3 Padang

Jl. Jend. Sudirman No.11, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat

SMKN 4 Bandar Lampung

Jl. Hos Cokroaminoto No.102, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung

SMKN 3 Bandung

Jl. Solontongan No.10, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

SMKN 2 Semarang

Jalan Dokter Cipto No.121A, Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah

BDP DOKUMENTASI



SMKN 1 Kedawung Cirebon

Jl. Tuparev No.12, Sutawinangun,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat

SMKN 4 Bandar Lampung

Jl. Hos Cokroaminoto No.102, Enggal, Engal,
Kota Bandar Lampung, Lampung

SMKN 1 Bandung

Jl. Wastukencana No.3, Babakan Ciamis,
Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat

SMKN 3 Bandung

Jl. Solontongan No.10, Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa
Barat



AKUNTANSI DOKUMENTASI

SMKN 1 Sabang

Jl. Bypass, Cot Ba'u, Sukajaya, Cot Ba'u,
Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh

SMKN 3 Padang

Jl. Jend. Sudirman No.11, Kp. Jao, Kecamatan
Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat

SMKN 2 Semarang

Jalan Dokter Cipto No.121A, Karangturi,
Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Tabel. Capaian Kinerja IKK 1.1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			TARGET AKHIR RENSTRA		ANGGARAN		
	TARGET	REAL	%	TAHUN 2024	%	ALOKASI	REALISASI	%
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	3020	3215	106.46	9456	33.99	44.421.197.000	43.727.686.000	99.83

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 1.1. dengan hasil yang melebihi target, sebesar 106.46% atau 3215 Orang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 3020 orang. Capaian kinerja IKK 1.1. berkontribusi sebesar 33.99% pada pencapaian target Renstra (2024). Sedangkan untuk serapan anggaran 99.83% atau Rp. 43.727.686.000,- yang terserap dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 44.421.197.000,-.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh:

- a. Adanya kecermatan dalam pelaksanaan pelatihan dalam menghadapi pandemic covid dan perubahan kebijakan dengan merubah rencana penjadwalan dan pola pembelajaran dari diklat tatap muka menjadi diklat daring dan diklat blended.
- b. Adanya Panduan Pelatihan dan Implementasi Pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Magang Industri di lokasi (SMK) memungkinkan untuk menghadirkan peserta lebih banyak sehingga capaian target dapat tercapai.
- d. Berkoordinasi dengan Unit terkait dalam merevisi anggaran untuk mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal

Kendala / Permasalahan :

1. Jaringan internet di wilayah Kalimantan agak sulit;
2. Transportasi lokal Sekolah di wilayah Kalimantan yang terbatas;
3. Revisi anggaran;
4. Menyesuaikan LMS prioritas dengan Kurikulum Merdeka;
5. Peserta mundur dikarenakan mengikuti kegiatan lain yang bersamaan di sekolah, mempunyai bayi atau balita dan tidak mendapatkan izin dari keluarga, mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Keterbatasan tenaga pengajar di Sekolah sehingga tidak diizinkan oleh Kepala Sekolah, jarak tempuh ke kota terlalu jauh dan dikarenakan sakit;
6. Sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim Tendik;
7. Sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim PKB;
8. Kepala Sekolah Alumni perlu melakukan desiminasi terhadap sekolah sekitar;
9. Sekolah mengalami kesulitan melakukan MoU dengan Industri.

Strategi / Antisipasi :

1. Berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke Sekolah di wilayahnya;
2. Berkoordinasi dengan Disdikprov mengenai sekolah sasaran yang dapat didampingi secara luring dan terjangkau aksesnya;
3. Terkait dengan penambahan sasaran akibat perubahan kebijakan dengan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring;
4. Review LMS sebelum diklat daring, yaitu tanggal 11-13 Juli;
5. Terkait sinkronisasi data berkoordinasi dengan direktorat terkait dan Disdikprov;
6. Berkoordinasi dengan unit utama untuk melakukan revisi anggaran baik lewat DJA, Kanwil dan POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Peserta digantikan oleh peserta yang telah mengikuti pelatihan Smart Training dan LULUS dengan nilai minimal Baik

8. Penyelenggara memfasilitasi peserta melakukan MoU/PKS dengan industri tempat magang peserta dan melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak tersebut melalui Rakortek
9. Melakukan revisi POK sesuai tuntutan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlak

2. IKK. 1.2

Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Pada IKK ini kegiatan yang mendukung adalah kegiatan perencanaan berbasis data (PBD). Ada beberapa tahapan pendukung terkait penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi dalam hal ini Perencanaan Berbasis Data (PBD) , antara lain :

Tahapan Kegiatan Perencanaan Berbasis Data (1/2)



lanjutan ...**tahapan** (2/2)



Sedangkan untuk Defisi Operasionalnya adalah sebagai berikut :

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi
IKK	:	2.6.4.3. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Definisi:

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Lingkup satuan pendidikan vokasi yang akan dipetakan mutunya adalah SMK (A) dan LKP (B) (bidang vokasional).

Tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan vokasi.

Metode Penghitungan:

$$I = A + B$$

$$1181 = 1181 + 0$$

Tabel. Capaian kinerja IKK 1.2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			TARGET AKHIR RENSTRA		ANGGARAN		
	TARGET	REAL	%	TAHUN 2024	%	ALOKASI	REALISASI	%
Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811	1181	145.62	2718	43.45	5.110.861.000	5.110.811.000	100

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 1.2. dengan hasil yang melebihi target, sebesar 145.62% atau 1181 Orang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 811 Lembaga . Capaian kinerja IKK 1.2. berkontribusi sebesar 43.45% pada pencapaian target Renstra (2024). Sedangkan untuk serapan anggaran hamper 100% atau Rp. 5.110.861.000,- yang terserap dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.110.811.000,-.

Perbandingan capaian kinerja 2022 dengan tahun 20201 dan target akhir Renstra serta Capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, dikarenakan IKK.1.2 Tahun 2022 merupakan IKK baru yang berbeda dengan IKK.1.2 Tahun 2021 dimana pada Tahun 2022 perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dengan IKK pada Tahun 2021

Keberhasilan capaian ini didukung oleh:

Kerberhasilan didukung oleh adanya ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana penjadwalan yang sudah ditetapkan sebelumnya antara lain:

1. IHT Bimtek Tim PBD Bispar Sosialisasi PBD ke Pemerintah Daerah (6 Provinsi) pada terlaksana Tanggal 20 sd 22 Juni 2022;

2. Sosialisasi PBD ke Satuan Pendidikan SMK (6 Provinsi) pada tanggal 7 sd 8 Juli 2022;
3. Pendampingan/Supervisi PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi. Periode Juli sd Oktober 2022 secara luring ke 6 wilayah binaan BBPPMPV Bispar yakni Provinsi DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Barat dan Prov.Kalimantan Utara sebanyak 150 SMK ;
4. Pendampingan PBD secara daring ke sekolah yang belum didampingi secara luring, yakni 1.031 SMK;
5. Monev Pelaksanaan PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi dilaksanakan pada bulan Oktober 2022;
6. Penyusunan laporan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Bulan Desember 2022.

Kendala / Permasalahan :

1. Perubahan program kegiatan penjaminan mutu menjadi perencanaan berbasis data, mengakibatkan perubahan penjadwalan yang telah ditetapkan pada awal tahun;
2. Terkendala dengan jaringan internet untuk sosialisasi ke SMK, wilayah kalimantan di pedalaman susah sinyal.;
3. Fasilitator BBPPMPV Bispar yang terbatas;
4. Fasilitator kurang memahami Perencanaan Berbasis Data sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam mengerjakan LK /output yang harus dihasilkan;
5. Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi belum memahami terkait Perencanaan Berbasis Data khususnya penggunaan Rapor Pendidikan dalam perencanaan daerah.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Direktorat SMK terkait kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data;
2. Berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK SMK di wilayahnya;

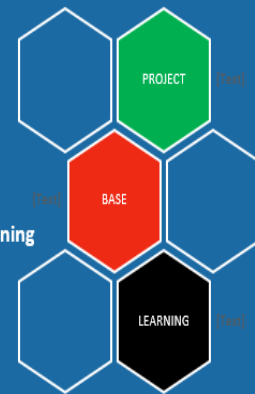
3. Berkoordinasi dengan dit SMK untuk penambahan Fasilitator dari dit SMK untuk mengajar;
4. Berkonsultasi dengan Tim Narasumber Perencanaan Berbasis Data dari Direktorat SMK, agar menghasilkan pemahaman yang sama;
5. Narasumber dari Tim Perencanaan Daerah Dit.SMK memberikan informasi terkait Perencanaan Berbasis Data bagi Pemerintah Daerah dan Tim Penjaminan Mutu BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ikut mengawal pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis data sesuai provinsi yang menjadi tanggung jawabnya

3. IKK. 1.3

Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

INOVASI MODEL PEMBELAJARAN VOKASI MENGACU PADA DUNIA KERJA (MODEL PROJECT BASE LEARNING)

- 1 KEGIATAN : Pengembangan Model Pembelajaran Project Base Learning
 SASARAN/TARGET : 2 Model
 TANGGAL PELAKSANAAN : Oktober sd Desember 2022
 KETERANGAN : Pengembangan 2 model pembelajaran berbasis Project Base Learning

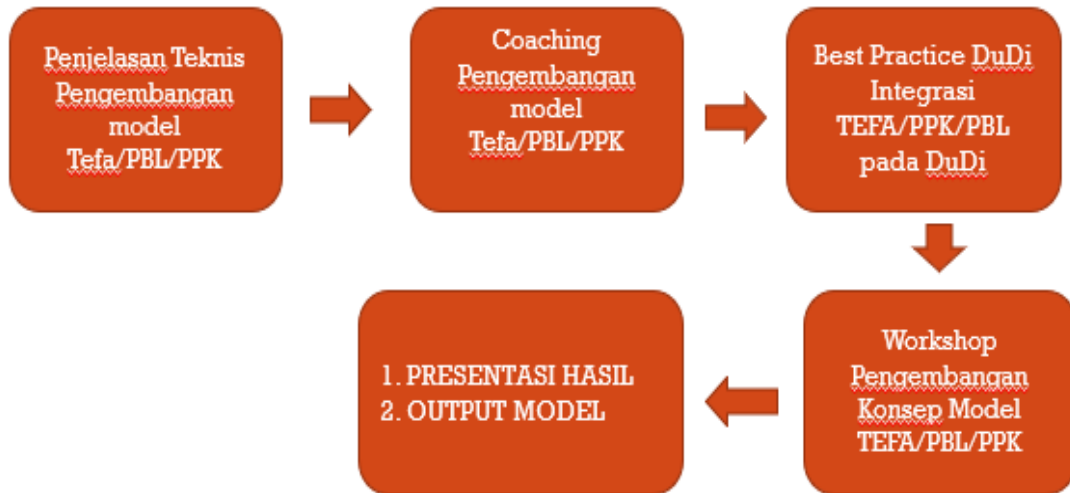


PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN, 2 MODEL DI BISPAR

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penyusunan konsep model pembelajaran TEFA dan PBL	1 Model
2	Penyusunan konsep model pembelajaran Produk Kreatif	1 Model
		1. Try out model-evaluasi-konsep Model Sampai Jadi Di Print Out (sebagai bahan masukan untuk Ditjen Diksi menjadi model pembelajaran vokasi) 2. 40 Orang Peserta Dari: 12 Industry, 12 SMK yang tahun kemarin dan WI Bispar Bidang Bisnis & Pariwisata (Orang yang terlibat dituliskan dalam buku model tersebut)



ALUR PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN



Defisini Operasional

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK : Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Vokasi

IKK : 2.6.4.4. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Definisi:

Model adalah *representatif* yang akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terrepresentasikan dari model itu. Model juga dapat diartikan sebagai visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga model dapat berwujud sebagai: (1) tipe atau desain, (2) deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi, (3) deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. Di samping itu juga model memiliki tujuan yang hendak dicapai dan memiliki prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Metode Penghitungan:

I = Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar Vokasi
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Tabel. Capaian kinerja IKK 1.3

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022			TARGET AKHIR RENSTRA		ANGGARAN		
	TARGET	REAL	%	TAHUN 2024	%	ALOKASI	REALISASI	%
Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	2	100	9	22.22	260.571.000	260.019.000	99.98

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 1.3. dengan hasil yang sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar 100% atau 2 Model dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 2 Model. Capaian kinerja IKK 1.3. berkontribusi sebesar 22.22% pada pencapaian target Renstra (2024). Sedangkan untuk serapan anggaran hamper 99.98% atau Rp. 260.019.000,- yang terserap dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 260.571.000,-.

Perbandingan capaian kinerja 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir Renstra serta Capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, dikarenakan IKK.1.3 Tahun 2022 merupakan IKK baru yang berbeda dengan IKK.1.3 Tahun 2021 dimana pada Tahun 2022 perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dengan IKK pada Tahun 2021

Keberhasilan capaian ini didukung oleh :

Model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran TEFA dan PPK. Dari pelaporan bantuan tefa dan ppk thn kemarin dipilih praktik baik di sekolah. Sekolah penerima bantuan dimasukkan ke dalam buku model pembelajaran tefa dan model pembelajaran PPK Tahun ini, setelah draft buku disusun diuji keterbacaan oleh kepala departemen dan sekretaris departemen, tim pengembang tefa dan ppk serta penanggung jawab tefa dan ppk di sekolah, draft final buku tefa dan ppk sdh ada dan skoring instrumen sebagai penyempurnaan penyusunan model. Pada Kegiatan Pendampingan kemitraan digunakan sebagai uji keterbacaan model pembelajaran tefa dan ppk karena sekolah pusat belajar sebagai mitra bispa juga sudah berhasil dalam menerapkan tefa dan ppknya

Kendala / Permasalahan :

Terkendala rentang waktu yang singkat dalam penyusunan model

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi untuk menentukan rentang waktu dalam penyusunan model pembelajaran di Tahun yang akan datang

Sasaran Kegiatan 2 yaitu **"Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata", terdiri dari 2 IKK, yaitu:**

1. IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata;
2. IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata.

1. IKK. 2.1

Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Berdasar Perpres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata termasuk salah satu UPT yang telah mengimplementasikan SAKIP, dan sejak tahun 2020 telah mencantumkan perolehan predikat SAKIP dalam salah satu butir Perjanjian Kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan evaluasi kuantabilitas pada instansi pemerintah. Berdasarkan Lembar hasil evaluasi SAKIP Final yang sudah ditandatangani oleh Itjen Kemdikbudristek yang dilaksanakan melalui aplikasi Spasikita BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memperoleh nilai masuk dalam kategori "A" dengan penilaian SAKIP 83.65.



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25.5
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24.6
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12.3
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	83.65

No	Catatan
1	Kualitas Pelaporan Kinerja Pada Bagian Efisiensi Perlu Ditingkatkan.
2	Pengukuran kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam melakukan mutasi pegawai baik di internal maupun eksternal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi
3	Satker belum mengidentifikasi aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan data kinerja dan memastikan validitas data yang dikumpulkan.

No	Rekomendasi
1	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja terutama pada bagian efisiensi Untuk Menambahkan Aspek Pemanfaatan Laporan Kinerja Berikutnya.
2	Membuat pedoman yang memastikan bahwa Pengukuran Kinerja Pegawai dijadikan dasar dalam melakukan mutasi pegawai baik di internal maupun eksternal organisasi.
3	Melakukan identifikasi terhadap aplikasi atau membuat aplikasi/sistem yang sederhana untuk menunjang proses pengumpulan data kinerja dan memastikan validitas data yang dikumpulkan

Jakarta, 23 Desember 2022

Inspektur IV,



Masrul Latif

Definisi Operasional SAKIP :

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
IKK	:	5.3.7.1. Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Definisi:

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “BB” adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “BB”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Pendidikan Vokasi.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker Ditjen Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Tabel. Capaian kinerja IKK 2.1

**Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan
Vokasi Bisnis Dan Pariwisata**

2021			2022			Target Akhir Renstra	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra (2024)
TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
75	82.92	110.56	80.01	83,65	104,55	A	100

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 2.1. dengan hasil yang sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar 104.55% atau Nilai "A" dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 'A". Capaian kinerja IKK 2.1. berkontribusi sebesar 100% pada pencapaian target Renstra (2024).

Capaian predikat A diinterpretasikan sebagai memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan akuntabel.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan IKK ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan BB dapat tercapai ataupun melebihi dari target yang ditentukan
2. Rencana Strategis telah disusun berdasarkan Renstra eselon I dan Renstra Kemendikbud, serta direviu setiap tahun,
3. Perjanjian Kinerja selaras dengan Renstra, Program Kerja, DIPA serta RKAKL,
4. Pengukuran Kinerja dilaksanakan secara regular, oleh Tim SAKIP dan dikonfirmasi serta dilaporkan pada tim manajemen,

5. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi serta evaluasi mandiri terkait penilaian SAKIP dengan maksimal berdasarkan kekurangan SAKIP sebelumnya
6. Pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan dasar pengambilan keputusan berikutnya.

Kendala / Permasalahan :

1. Dokumen kelengkapan evaluasi sakip yang belum sesuai dengan kualitas penilaian;
2. Belum ada Inovasi yang dilakukan dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan A dapat tercapai dan hasil yang diperoleh sesuai target awal yakni nilai "A";
2. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi sakip dan pendukung
3. Melakukan evaluasi mandiri
4. Melakukan inovasi dalam pengumpulan data kinerja maupun pengukuran kinerja secara bertahap agar di penilaian SAKIP Tahun mendatang sudah terdapat Inovasi yang dilakukan

2. IKK. 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi Spasikita Biro Perencanaan Kemdikbudristek dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kementerian Keuangan.

Capaian nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan penilaian berdasarkan :

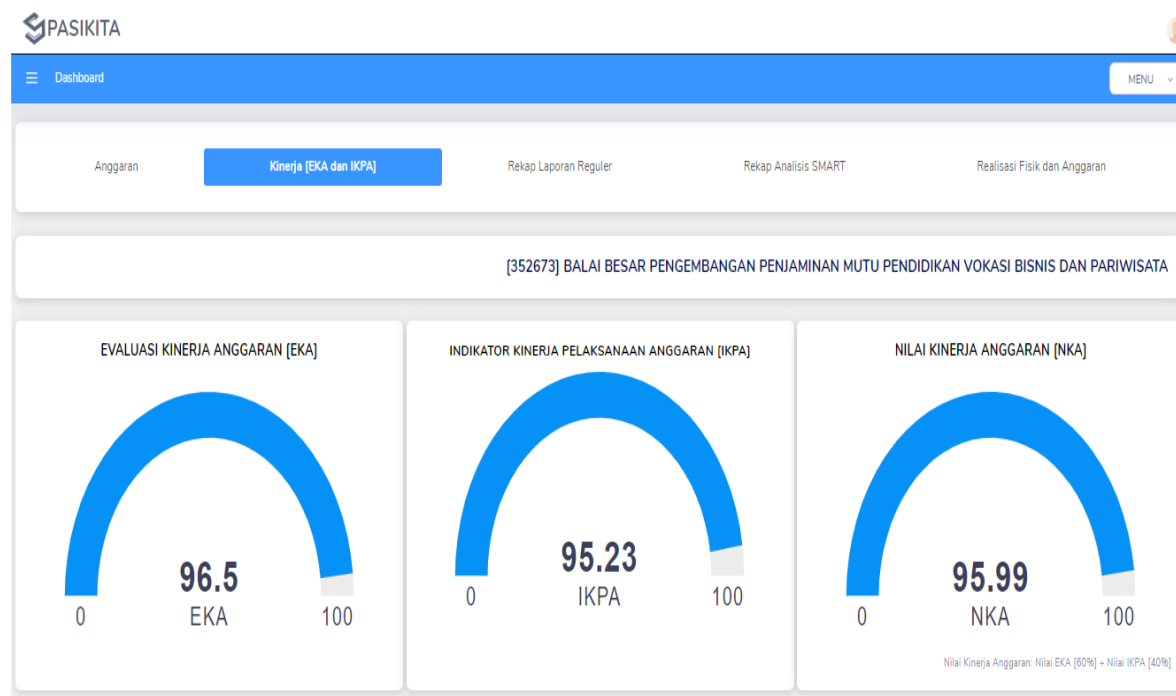
1. **Nilai EKA (60%)** yang diambil dari evaluasi kinerja anggaran pada aplikasi SPASIKITA pada menu SIMPROKA dan,
2. **Nilai IKPA (40%)** yakni indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Adapun Definisi Operasional yang diambil dari Ditjen Pendidikan Vokasi Sebagai berikut :

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
 IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p>	<p>Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.</p> <p>Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Rerata NKA} = \frac{\sum \text{Nilai NKA}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$ <p>Keterangan:</p> <p>NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L</p> <p>Satuan: Nilai Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Setditjen Pendidikan Vokasi	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan

Adapun hasil NKA BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2022 adalah :



**Tabel. Capaian kinerja IKK 2.2
 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar
 Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
 Bisnis Dan Pariwisata**

2021			2022			Target Akhir Renstra	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra (2024)
TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
93.50	97.82	104.62	93.50	95.99	102.66	95,50	100.51

Pada Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan IKK 2.2. dengan hasil yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar 102.66% atau Nilai "95.99" dari target

kinerja yang ditetapkan sebesar '93.50". Capaian kinerja IKK 2.1. berkontribusi sebesar 100.51% pada pencapaian target Renstra (2024). Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 ada penurunan dari 97.82 menjadi 95.99

Keberhasilan didukung oleh :

1. Semua proses kegiatan. kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target ini dengan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mendorong nilai NKA lebih baik baik dari penilaian EKA seperti Bobot Penyerapan, Bobot Konsistensi, Bobot Capaian Rincian Output dan Bobot Efisiensi maupun penilaian IKPA
2. Melakukan evaluasi kinerja per trwiulan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Dengan usaha yang dilakukan NKA yang dihasilkan pada Tahun ini sebesar 95.99 melebihi target yang ditetapkan yaitu 93.50

Kendala / Permasalahan :

Adanya revisi anggaran baik buka blokir AA, penambahan dana bun, revisi kelebihan belanja pegawai ditingkat unit utama menjadi salah satu indikator ketercapaian nilai IKPA tidak maksimal diantaranya konsistensi penyerapan dan revisi hal III DIPA

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait yakni Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar dalam revisi dikemudian hari tidak mengganggu atau tidak bersamaan dengan revisi hal III di Kanwil DJPB;
2. Melakukan revisi POK internal sesuai kebutuhan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan pengisian aplikasi spasikita baik menu simproka dan kinerja dengan tepat waktu

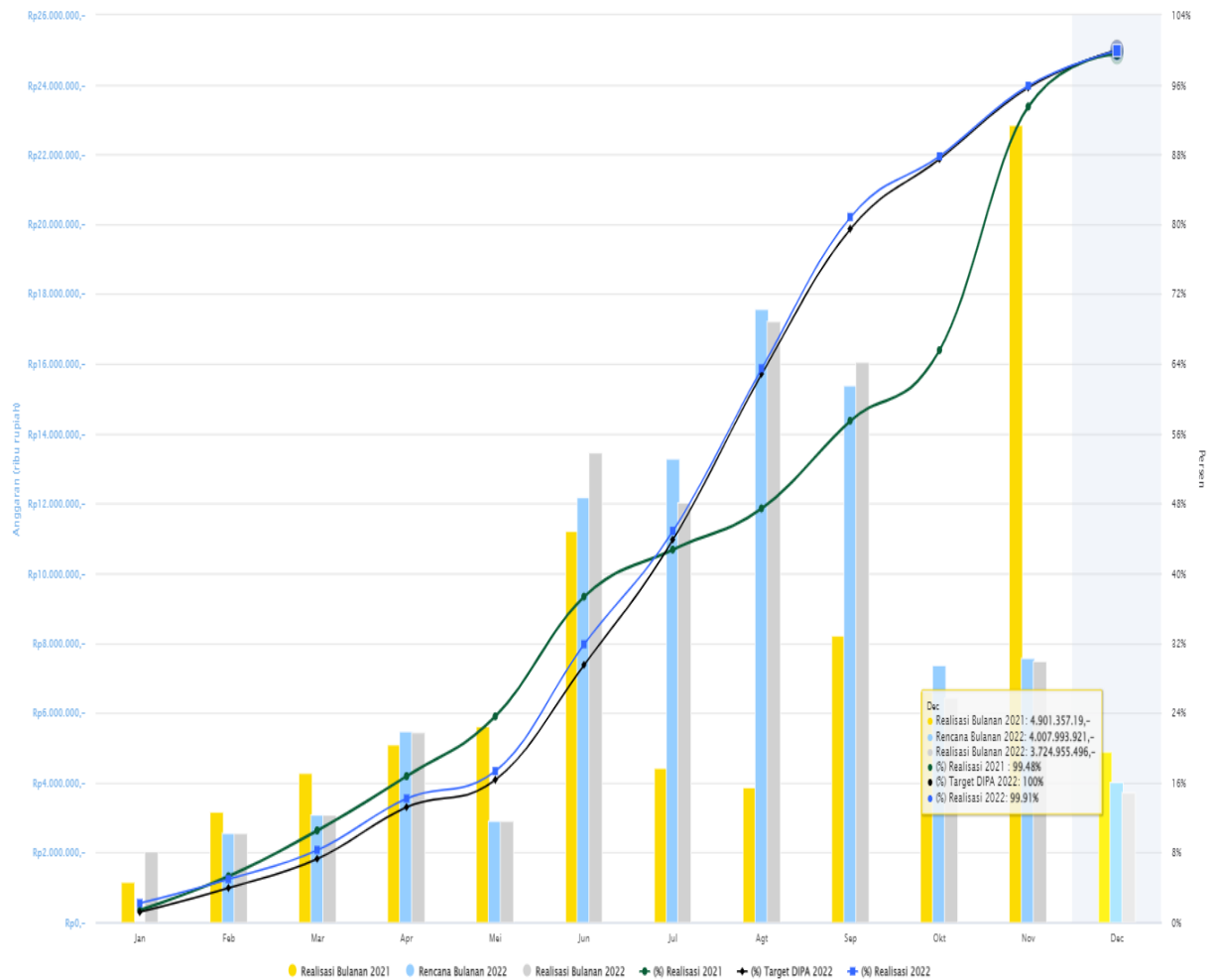
B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 92.467.844.606,- atau mencapai 99,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 92.563.370.000,-



Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran T.A 2022

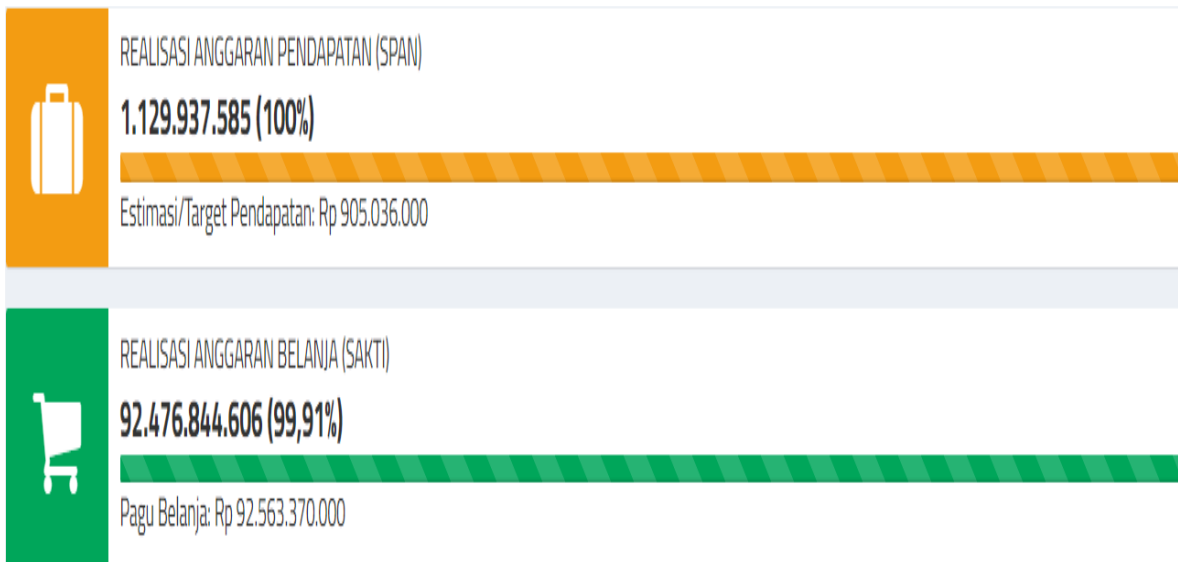


Realisasi Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	24.885.901.000	0	24.881.966.343	99,98	24.881.966.343	99,98
2	BELANJA BARANG	67.677.469.000	0	67.594.878.263	99,88	67.594.878.263	99,88
	TOTAL	92.563.370.000	0	92.476.844.606	99,91	92.476.844.606	99,91

Realisasi Per Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	RUPIAH MURNI	92.194.499.000	0	92.181.748.406	99,99	92.181.748.406	99,99
2	PNBP	368.871.000	0	295.096.200	80,00	295.096.200	80,00
	TOTAL	92.563.370.000	0	92.476.844.606	99,91	92.476.844.606	99,91



TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 (KRO – RO)

NO.	KRO - RO	SASARAN				ANGGARAN				
		SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU	BLOKIR	REALISASI	SISA	%
	BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA					92.563.370.000		92.467.844.606	95.825.394	99,91
	DL. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					50.651.307.000		50.575.511.200	75.795.800	99,85
	DL.4468. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi					50.651.307.000		50.575.511.200	75.795.800	99,85
1	AEC. Kerjasama	Kesepakatan	17	45	264,71	858.678.000		858.388.000	290.000	99,97
	AEC.001. Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja					858.678.000		858.388.000	290.000	99,97
2	QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	811	1181	145,62	5.110.861.000		5.110.811.000	50.000	99,999
	QDB.001. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi					5.110.861.000		5.110.811.000	50.000	99,999
3	SCI. Pelatihan Bidang Pendidikan	Orang	3020	3215	106,46	44.421.197.000		44.345.783.200	74.768.000	99,83
A	SCI. Pelatihan Bidang Pendidikan – APBN	Orang	2215	2398		14.844.038.000		14.736.028.200	73.736.000	99,27
	SCI.001. Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja		837	938		4.186.914.000		4.186.564.000	350.0000	99,99
	SCI.002. Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri		1338	1420		10.318.724.000		10.212.382.200	73.386.800	98,97
	SCI.003. Dosen yang mendapatkan pelatihan kompetensi berbasis kerjasama industri		20	20		208.800.000		208.800.000	-	100,00
	SCI.004. Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan		20	20		129.600.000		129.600.000	-	100,00
B	SCI. Pelatihan Bidang Pendidikan - BA BUN	Orang	805	817		29.577.159.000		29.576.127.000	1.032.000	99,997
	SCI.002. Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri (BA>BUN)		705	717		25.902.975.000		25.902.588.000	387.000	100,00
	SCI.003. Dosen yang mendapatkan pelatihan kompetensi berbasis kerjasama industri		50	50		1.997.092.000		1.996.911.000	181.000	99,99
	SCI.004. Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan		50	50		1.677.092.000		1.676.628.000	464.000	99,97
4	SDC. Penelitian dan Pengembangan Modeling	Model	2	2	100,00	260.571.000		260.529.000	42.000	99,98
	WA. Program Dukungan Manajemen					41.912.063.000		41.901.333.406	10.729.594	99,97
	WA.4261. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Layanan	2	2	2	41.912.063.000		41.901.333.406	10.729.594	99,97
	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	2	2	41.912.063.000		41.901.333.406	10.729.594	99,97
1	EBA.962. Layanan Umum	Layanan	1	1	1	2.197.556.000		2.197.548.800	7.200	100
2	EBA.994 Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1,	39.714.507.000		39.703.784.606	10.722.394	99,35

2. EFISIENSI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 BBPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil melakukan efisiensi anggaran. Hasil efisiensi tersebut berasal pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Vokasi. Diantaranya merubah pola luring menjadi daring, efisiensi unit cost belanja barang, dan optimalisasi perjalanan dinas dan meeting. Dengan adanya ada efisiensi anggaran maka ada optimalisasi untuk menambah jumlah sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata. Diantaranya antara lain :

- a. Pada RO. 4468.QDB.001. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi sasaran awal dari 811 Lembaga menjadi 1181 Lembaga dengan alokasi anggaran Rp. 5.110.861.000,-. Pencapaian ini dilakukan dengan mengubah pola luring menjadi daring dan luring (blended). Efisiensi yang dilakukan sebesar 45.62% atau sebesar Rp. 2.331.551.978,-
- b. Pada RO. 4468.SCI.002. Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri, ada efisiensi sebesar Rp. 204.865.000,- dengan melakukan kegiatan diklat reskilling tambahan di Lembaga dengan pola Pelatihan – Magang - Uji sertifikasi Industri – Penyelarasan Industri dengan Pola 130 Jp dengan sasaran 12 Orang.
- c. Pada RO. 4468.SCI.002. Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri, dengan alokasi yang sebesar Rp. 985.842.000,- ada efisiensi sebesar Rp. 91.862.000,- dengan melakukan kegiatan diklat daring dari 798 org mampu menambah sasaran menjadi 880 orang
- d. Pada RO/4468.SCI.001 Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja, sasaran awal dari 837 orang menjadi 938 orang dengan alokasi anggaran Rp. 4.186.914.000,-. Pencapaian ini dilakukan dengan mengubah pola luring menjadi daring dan luring (blended). Efisiensi yang dilakukan sebesar 12.07% atau sebesar Rp. 505.360.000,-

3. Inovasi, Penghargaan dan Program Crosscutting/Collaborative

a. Pada tahun 2022, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata melakukan inovasi dengan pengembangan Aplikasi SIMPEDIK merupakan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaran Diklat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. SIMPEDIK mengakomodir 2 layanan antara lain :

1. layanan data sekolah guru dan MGMP Bidang Bisnis dan Pariwisata
2. Layanan Diklat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Untuk melihat Aplikasi SIMPEDIK dapat mengunjungi <https://sim.bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id>



b. Penghargaan

PENGHARGAAN



Meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (Kemenpan 2020)

Sertifikasi Lisensi LSP Pihak Kedua (BNSP / 2017)

Sertifikasi Akreditasi (Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja / 2016)

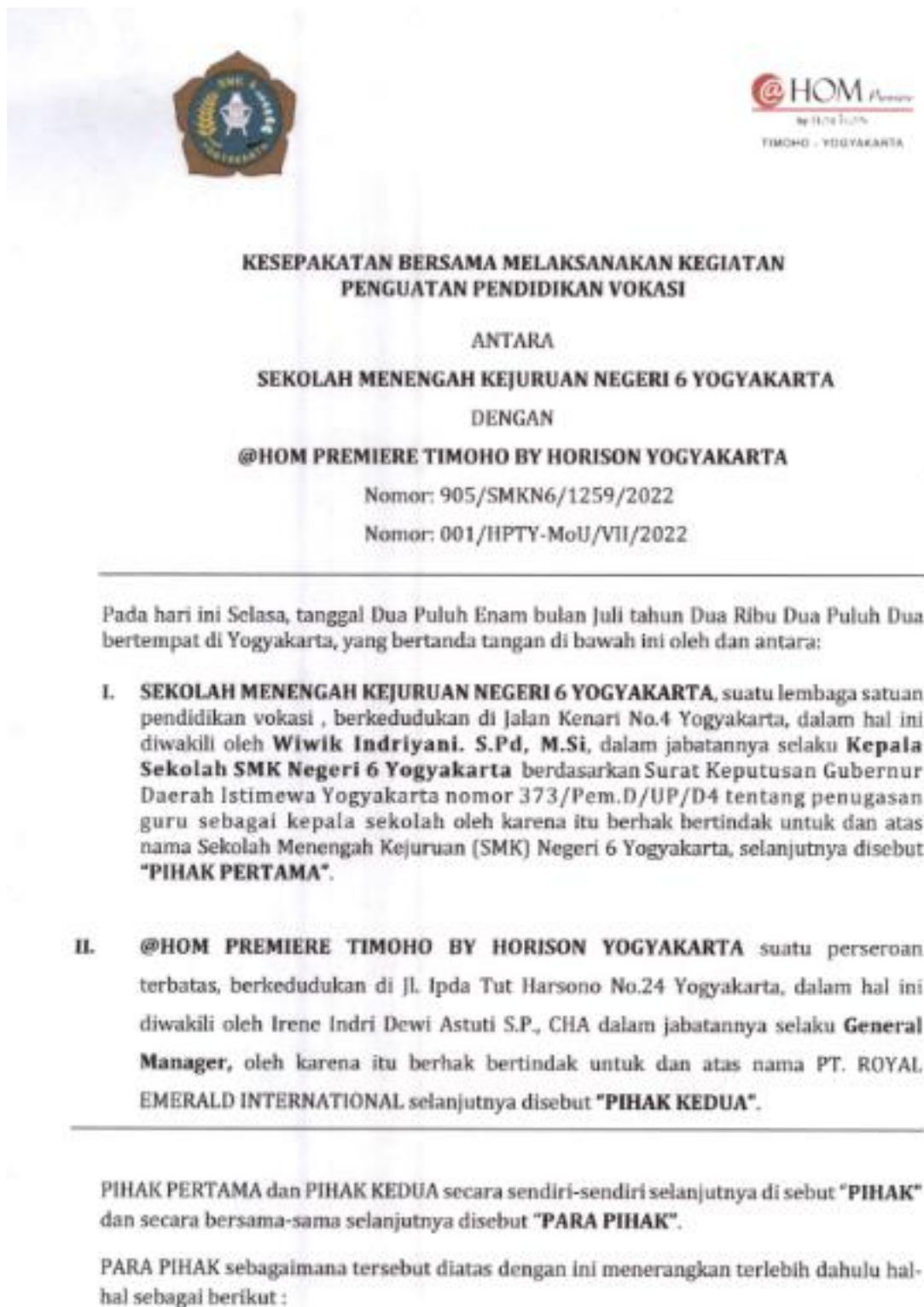
Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 (Tahun 2011 & 2014)

Sertifikasi SMM ISO 9001:2000 (Tahun 2005 & 2008)

Penghargaan Citra Pelayanan Prima (Presiden RI / 2006)

c. **Progam Crosscutting / Collaborative**

Ini merupakan salah satu contoh MoU antara Sekolah dan Industri yang telah disepakati dalam melaksanakan kegiatan penguatan pendidikan vokasi dengan kolaborasi dengan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2022



- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 0311/0/1975, tertanggal 17 April 1975 yang bergerak dalam bidang pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan akta nomor: 31 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Sugeng Budiman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat keputusan tanggal 24 Juli 2015, nomor: AHU-2448651.AH.01.01 **tahun 2015** yang bergerak dalam bidang **Perhotelan**
- c. bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud mengadakan kolaborasi kerjasama guna menunjang Proses Pendidikan dan Pengajaran vokasi, khususnya *pada Bidang Keahlian Bisnis dan Pariwisata*.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama melalui kesepakatan bersama melaksanakan penguatan pendidikan vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dan langkah awal dalam melaksanakan kerjasama dengan dasar itikad baik dalam hal *pendidikan, implementasi penguatan pendidikan vokasi, magang industri dan uji sertifikasi Industri* dalam implementasi Penguatan Pendidikan Vokasi bidang bisnis dan Pariwisata
2. Tujuan perjanjian ini adalah saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam mendayagunakan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing PIHAK guna pengembangan dibidang ilmu pengetahuan dan penelitian, serta memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan masyarakat di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan perjanjian ini mencakup pelibatan dalam

- a. Penyusunan Kurikulum yang diselarasakan dengan Industri
- b. Penerapan Pembelajaran berbasis Proyek Rill dari Dunia kerja/Industri (PBL) ;
- c. Peningkatan Jumlah dan peran Guru Tamu Industri dalam Pembelajaran
- d. Praktik Kerja Lapangan di Industri minimal satu semester
- e. Uji Sertifikasi Industri;
- f. Update Teknologi dan Pelatihan oleh industri pada proses Pembelajaran di SMK
- g. Penerapan Riset Terapan dalam mendukung Teaching Factory
- h. Berkomitmen dalam Keterserapan lulusan oleh Dunia Industri
- i. Beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dari Industri

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA akan berkontribusi dalam hal sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pembuatan penyusunan kurikulum Bersama Industri
 - b. Menerapkan pembelajaran berbasis Proyek Rill dari Dunia kerja/Industri (PBL);
 - c. Memfasilitasi Guru Tamu yang melakukan Pembelajaran di Sekolah
 - d. Menyediakan Sumber daya manusia/peserta diklat dan siswa pada kegiatan Praktek Kerja lapangan di Industri;
 - e. Mengikuti Uji sertifikasi Industri;
 - f. Mengkoordinir kegiatan Pelatihan dari Industri;
 - g. Menerapkan Riset Terapan dalam mendukung Teaching factory ;
 - h. Melakukan kerja sama Industri dalam membantu keterserapan lulusan;
 - i. Mengelola dan mengkoordinir bantuan yang telah diberikan Industri

2. PIHAK KEDUA akan berkontribusi dalam hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum Bersama
 - b. Memfasilitasi dalam Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Rill
 - c. Menyediakan Guru tamu/ Narasumber Industri untuk melakukan Pembelajaran di Sekolah
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi tempat Praktek kerja lapangan bagi Guru maupun peserta diklat di Industri;
 - e. Memfasilitasi Uji Sertifikasi Industri
 - f. mengorganisir pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - g. Melakukan Riset Terapan dalam mendukung Teaching Factory
 - h. Melakukan Kerja sama dalam Membantu keterserapan lulusan
 - i. Memberikan bantuan berupa beasiswa/ikatan dinas dan Donasi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penyusunan kurikulum Bersama dengan Industri;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima Pembelajaran berbasis Proyek Rill dari Industri
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menerima Guru tamu/ Narasumber Industri untuk melakukan pembelajaran di Sekolah;
 - d. PIHAK PERTAMA wajib memahami ketentuan dan peraturan dari industri tempat magang
 - e. PIHAK PERTAMA wajib mengawasi bersama proses uji sertifikasi industri;
 - f. PIHAK PERTAMA wajib mengawasi bersama jalanya proses peningkatan kompetensi;
 - g. PIHAK PERTAMA wajib menerapkan Riset Terapan dalam mendukung Teaching Factory
 - h. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi kerja sama dalam Keterserapan lulusan
 - i. PIHAK PERTAMA berhak menerima dan mengelola Beasiswa maupun bantuan yang telah diberikan Industri;

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak diikutsertakan dalam penyusunan Materi dalam Peningkatan Kompetensi
 - b. PIHAK KEDUA wajib diikutsertakan dalam Pembelajaran berbasis Proyek Rill
 - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Narasumber Industri dan melakukan pembelajaran di Sekolah
 - d. PIHAK KEDUA berhak menerima peserta dalam proses penyalarsan industri/magang industri sesuai kapasitas yang tersedia;
 - e. PIHAK KEDUA wajib melakukan Uji Sertifikasi Industri pada peserta diklat/magang
 - f. PIHAK KEDUA wajib memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
 - g. PIHAK KEDUA berhak melakukan Riset Terapan dalam Mendukung Teaching Factory di Sekolah
 - h. PIHAK KEDUA berhak mengawasi kerja sama dalam mendukung keterserapan lulusan
 - i. PIHAK KEDUA berhak memberikan beasiswa/ikatan dinas dan bantuan kepada Sekolah.

PASAL 5
BIAYA DAN PAJAK

1. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan/ atau sesuai kesepakatan antara PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu kesepakatan tertulis yang terpisah atas kegiatan-kegiatan atau program-program bersama yang dilakukan dikemudian hari.
2. Pajak-Pajak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dan yang semata-mata berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi yang dibubuhi kata rahasia apapun kepada pihak lain atau Badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian ini, kecuali berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya terlebih dahulu.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini dikecualikan apabila:
 - a. informasi tersebut telah diketahui umum dan/ atau menjadi milik publik;
 - b. informasi tersebut telah diketahui lebih dahulu oleh penerima informasi tanpa adanya suatu tindakan yang salah dari Pihak yang menerima informasi;
 - c. informasi tersebut telah disetujui untuk diberitahukan/ dibuka melalui persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pihak pemberi informasi;
 - d. informasi tersebut yang dibuka untuk kepentingan Negara karena ketentuan hukum, pemerintah, penyidik, dan atau atas perintah pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data-data dan informasi rahasia tersebut baik selama jangka waktu Nota kesepakatan dan setelah jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir, kecuali atas berdasarkan kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK.

P6ASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini menjadi tidak terpenuhi, peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, topan banjir, epidemi/ wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/ moneter, termasuk pemberlakuan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), Para Pihak dapat melakukan kesepakatan baru mengenai kondisi yang terjadi yang dapat dituangkan dalam addendum/ amandemen dan atas kesiapan Para Pihak, Para Pihak dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri perjanjian ini.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

Surat-menyurat serta komunikasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan alat-alat komunikasi tertulis atau tercatat termasuk tetapi tidak terbatas pada *telefax*, *email* dan surat tercatat, dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Yogyakarta

Jln. Kenari No 4 Yogyakarta

Nomor Telepon : 0274-512251

Nomor Faksimili : 0274-512251

Email : smkn6yk@gmail.com

PIHAK KEDUA:

@HOM PREMIERE TIMOHO BY HORIZON YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.24 Yogyakarta

Nomor Telepon : 0274 547 171

Nomor Faksimili : -

Email : info.timoho@hom--hotels.com

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat dalam hal keputusan dan/atau pengakhiran Kesepakatan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan dituangkan dalam Addendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kesepakatan ini.
3. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan itikad baik melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, apabila tidak ada titik temu diantara keduanya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan disaksikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

Kepala SMKN 6 Yogyakarta



Wiwik Indriyani, S.Pd., M.Si
NIP. 19731015 199802 2 003

PIHAK KEDUA

**@HOM PREMIERE TIMO HO BY HORIZON
YOGYAKARTA**



Irene Indri Dewi Astuti, S.P., CHA
General Manager

Kepala BBPPMPV Bispar



Sabli, SH., NII
NIP. 196405021993031002

Mengetahui:

**PT Metropolitan Golden Management
Horison Hotels Group**



Drs. Basari Bachri, M.M.
Direktur Operasional

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022 ini merupakan perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BBPPMPV Bisnis dan Parwisata kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Hingga akhir tahun 2022, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Perlu adanya perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik untuk dapat menunjang ketercapaian kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan efisiensi anggaran,
2. Koordinasi internal antar unit terkait untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran
3. Koordinasi yang baik antara Pusat dan Daerah serta seluruh stakeholder yang terlibat,

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang dapat diusulkan baik bagi organisasi internal, eksternal dilakukan antara lain :

- a. Unit-unit terkait saling berkoordinasi secara regular dan saling berkomitmen pada rekomendasi-rekomendasi perbaikan baik ditingkat internal satuan kerja maupun tingkat eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan;
- b. Bagi unit utama agar regulasi dapat disiapkan sebelum tahun berjalan agar pelaksanaan di tahun berjalan dapat direncanakan dengan baik untuk memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan

- c. Adanya upaya Lebih memfokuskan pada pelatihan keterampilan (praktek) dengan para ahli di bidangnya karena siswa SMK hampir 70 % fokus kepada keterampilan, jika hanya fokus ke teori saja tidak akan memenuhi kemampuan siswa saat di DUDI,
- d. Agar di perbanyak lagi pelatihan untuk guru, khususnya pelatihan pedagogik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN 2021**

Kami telah mereviu laporan kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Depok, Januari 2023
Ketua Tim Reviu

Nana Halim, S.E, M.M
NIP. 197312072002121001



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabli

Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wikan Sakarinto

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 28 Maret 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Wikan Sakarinto



Sabli

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2215
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93,50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 21.274.148.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 49.141.884.000
		TOTAL	Rp. 70.416.032.000

Depok, 28 Maret 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Wikan Sakarinto



Sabli



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabli

Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 28 Desember 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata,



Kiki Yuliati



Sabli

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2215
		[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	811
		[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	93.50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 50.651.307.000
2	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 41.912.063.000
		TOTAL	Rp. 92.563.370.000

Depok, 28 Desember 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kepala BBPMPV Bisnis dan Pariwisata,



Kiki Yulianti



Sabli



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BISNIS DAN PARIWISATA
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2215	TW1 : 0 TW2 : 637 TW3 : 2155 TW4 : 2215	TW1 : 0 TW2 : 938 TW3 : 3203 TW4 : 3215	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sudah ada pedoman untuk peningkatan kompetensi Guru, KS, Instruktur LKP</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Baru di launchingnya kurikulum merdeka dan pedoman baru saja disahkan sehingga baru dapat menyesuaikan program peningkatan kompetensi dengan pedoman 2. Adanya rencana penambahan anggaran terkait program reskilling dan upskilling dana BUN dengan target 805 Orang yang tersebar pada peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dosen, dan instruktur</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan diklat dengan unit-unit terkait baik internal maupun eksternal 2. Berkoordinasi dengan unit utama terkait revisi penambahan anggaran dan target dana BUN</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan II capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada IKK 1.1 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon antara Dirjen Pendidikan Vokasi dan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tanggal 28 Maret 2022 sebesar 2215 Orang dengan ketercapaian 938 orang atau 42,34% dengan alokasi anggaran Rp. 15.044.038.000 dengan realisasi Rp. 7.104.417.000,- atau 47,22%. Pada revisi DIPA 03 Tanggal 22 April 2022 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendapat penambahan sasaran dan anggaran lewat dana BUN sebesar 805 orang untuk kepala sekolah, guru, dosen, dan instruktur dengan anggaran sebesar Rp. 29.577.159.000, penambahan ini belum masuk pada PK Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Ketercapaian capaian sebesar 938 orang pada IKK 1.1 didukung oleh beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatannya sudah dilakukan adalah A. Pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan dunia kerja antara lain : 1. Sudah melakukan IHT bagi Fasilitator IKM dan PIP pada Tanggal 23 Mei sd 4 Juni 2022; 2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan IKM & PIP dengan Pemangku Kepentingan di 6 Provinsi wilayah Binaan Bispar pada Tanggal 7 sd 9 Juni 2022; 3. Bimtek Fasilitator dan Pendamping serta admin LMS Implementasi Kurikulum Merdeka dan IKM; 4. Pelatihan Komite Pembelajaran (134 SMK PK x 7 ORG) sebanyak 938 Orang setara 100 Jp. Sedangkan Kegiatan yang belum dilaksanakan dan direncanakan pada semester 2 adalah : 1. Pendampingan PIP baik dengan moda daring maupun luring serta monitoring dan evaluasi. B. Pelatihan pengawas, kepala sekolah, guru kejuruan, instruktur dan dosen vokasi Antara Lain : 1. Rakor umum terkait pelatihan Kepala Sekolah, Pengawas, Tendik, Dosen, dan Instruktur pada Tanggal 16 sd 18 Juni 2022; 2. Pelatihan guru sebanyak 400 orang guru diklat luring sudah terlaksana pada tanggal 27 Juni s.d 3 Juli 2022 namun pelaporan ketercapaiannya akan masuk pada laporan capaian triwulan; 3 karena kegiatannya berakhir di awal bulan juli dan untuk 880 orang guru diklat daring akan dilaksanakan pada 19 juli-5 agustus 2022; 4. Sudah dilakukan Pelatihan bagi Kepala Sekolah sebanyak 100 orang sudah terlaksana dari 6 wilayah binaan; 5. telah dilakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan pengawas dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14-20 juli 2022; 6. telah dilakukan persiapan dan pelaksanaan tenaga kependidikan (TU) pelatihan dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14-20 juli 2022; 7. telah dilakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan instruktur dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14-20 juli 2022; 8. telah dilakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan dosen dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14-20 juli 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala dan Permasalahan yang dihadapi : 1. Jaringan internet dipedalaman kalimantan susah sinyal; 2. Fasilitator Bispar Terbatas; 3. Alokasi Anggaran, pada DIPA Awal alokasinya untuk 837 Orang namun implementasinya ada 134 SMK PK dengan jumlah sasaran 938 Orang; 4. Menyesuaikan LMS prioritas dengan Kurikulum Merdeka; 5. ada peserta yang mengundurkan diri karena jarak tempuh ke kota terlalu jauh; 6. sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim Tendik; 8. sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim PKB;</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan Tindak Lanjut atas kendala yang dihadapi adalah : 1. berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK SMK di wilayahnya; 2. berkoordinasi dengan dit GTK untuk penambahan Fasilitator dari GTK untuk mengajar; 3. Terkait dengan penambahan sasaran akibat perubahan kebijakan dengan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring; 4. Revisi LMS akan dilaksanakan sebelum diklat daring, yaitu tanggal 11-13 Juli ; 5. Peserta yang berhalangan hadir akibat jarak yang jauh diganti dengan peserta dari provinsi yang sama; 6. Terkait sinkronisasi data berkoordinasi dengan direktorat terkait dan Disdikprov</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan III capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada IKK 1.1 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon antara Dirjen Pendidikan Vokasi dan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tanggal 28 Maret 2022 sebesar 2215 Orang dengan ketercapaian akumulasi sampai dengan TW.III sebesar 2398 orang atau 108,26% dari penetapan target kinerja yang telah disepakati. Pada revisi DIPA 03 Tanggal 22 April 2022 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendapat penambahan sasaran dan anggaran lewat dana BUN sebesar 805 orang untuk kepala sekolah, guru, dosen, dan instruktur dengan anggaran sebesar Rp. 29.577.159.000, penambahan ini belum masuk pada PK Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Ketercapaian realisasi capaian sampai dengan TW. III untuk penambahan dana dan target BUN sebesar 805 dari terealisasi sebesar 100%. Pada TW.III total anggaran yang sudah diserap pada IKK 1.1 jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja sebesar Rp. 39.411.735.000,- atau sebesar 88,72% dari total anggaran sebesar Rp. 44.421.197.000,-. Pada IKK 1.1 ini juga terdapat anggaran yang masih diblokir sebesar Rp. 200.000.000,- diharapkan anggaran blokir ini dapat dibuka atau dihapuskan agar tidak mengganggu serapan secara total anggaran. Adapun pada IKK 1.1 jika dibuat revisi PK Tahun 2022 maka target yang ditetapkan sebesar 3020 Orang sedangkan realisasi secara total hingga TW. III sebesar 3203 orang yang sudah terealisasi atau 106,06% dari target yang ditetapkan pada sumber dana APBN dan BA BUN Tahun 2022. Pada TW. III beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut : Kegiatannya sudah dilakukan pada Triwulan III dan Triwulan IV yang sedang berjalan adalah: A. Pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan dunia kerja antara lain : 1. Telah terlaksananya Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP) terhadap SMK di 6 Wilayah BBPPMPV Bispar yakni Prov. DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara yang dilaksanakan dalam jangka waktu periode bulan Juli s.d Oktober 2022 ke 134 SMK PK. 2. Webinar Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penyusunan Capaian Pembelajaran bagi SMK yang diikuti oleh 752 SMK dari 6 wilayah binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. 3. Kunjungan Kerja Pimpinan UPT ke daerah yang telah ditentukan, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok, yang dihadiri oleh Pimpinan daerah setempat serta sekolah jalur mandiri berbagi dan mandiri berubah. 4. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Implementasi Pembelajaran ke 90 SMK yang telah didampingi. Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada Triwulan IV adalah penyusunan laporan Pendampingan Implementasi Pembelajaran. B. Pelatihan pengawas, kepala sekolah, guru kejuruan, instruktur dan dosen vokasi Antara Lain : 1. Pelatihan Manajerial Pengawas Sekolah yang telah dilakukan pada tanggal 14 s.d 20 Juli 2022 sebanyak 20 orang dengan realisasi 100%; 2. Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah sebanyak 100 orang pada tanggal 27 Juni sd 3 Juli 2022 dengan realisasi 100%; 3. Pelatihan peningkatan kompetensi Guru SMK secara tatap muka pada tanggal 27 Juni sd 3 Juli 2022 sebanyak 400 orang dengan realisasi 100%; 4. Pelatihan Peningkatan kompetensi guru secara daring yang diikuti oleh 880 orang pada tanggal 19 Juli sd 5 Agustus 2022 dengan realisasi 100%; 5. Pelatihan bagi Tendik SMK bidang Bisnis dan Pariwisata secara luring sebanyak 20 orang pada tanggal 14 sd 20 Juli 2022 terealisasi 100%; 6. Pelatihan kompetensi Dosen Vokasi pada tanggal 14 sd 20 Juli 2022 sebanyak 20 orang terealisasi 100%; 7. Pelatihan Kompetensi bagi Instruktur Kursus dan Pelatihan sebanyak 20 orang pada tanggal 14 sd 20 Juli 2022 dengan realisasi 100%. Adapun kegiatan maupun pelatihan yang menggunakan anggaran dana BUN yakni : 1. Rakortek Upskilling dan Reskilling Guru SMK yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 sd 29 Juli 2022 dengan jumlah 186 org; 2. Pelatihan Reskilling dan Upskilling bagi Guru Kejuruan SMK Bisnis dan Pariwisata yang dilakukan sebanyak 572 orang pada tanggal 8 Agustus sd 31 September 2022 terealisasi 100,17% atau 573 orang; 3. Pelatihan Upskilling dan Reskilling bagi Kepala Sekolah pada tanggal 15 sd 24 Agustus 2022 dengan peserta sebanyak 133 orang dengan realisasi 132 Orang; 4. Pelatihan Upskilling dan reskilling bagi Instruktur LKP Boga, Kecantikan, Busana dan Perpajakan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sd 24 Agustus 2022 dengan realisasi 100%; 5. Diklat Upskilling dan reskilling bagi Dosen PTV Boga dan UPW pada tanggal 15 Agustus sd 2 September 2022 sebanyak 50 pesertadengan realisasi 50 peserta; 6. Diklat Reskilling dan Upskilling hasil efisiensi dana BA BUN untuk dioptimalisasi sebanyak 12 Orang yang akan dilaksanakan di Bulan Oktober.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala dan Permasalahan yang dihadapi : 1. Jaringan internet di wilayah kalimantan agak sulit ; 2. Transportasi lokal Sekolah di wilayah Kalimantan yang terbatas.; 3. Alokasi Anggaran pada DIPA Awal alokasinya untuk 837 Orang namun implementasinya ada 134 SMK PK dengan jumlah sasaran 938 Orang; 4. Menyesuaikan LMS prioritas dengan Kurikulum Merdeka; 5. ada peserta yang mengundurkan diri karena jarak tempuh ke kota terlalu jauh; 6. peserta mengundurkan diri karena mengikuti PPG; 7. sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim Tendik; 8. sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim PKB;</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan Tindak Lanjut atas kendala yang dihadapi adalah : 1. berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke Sekolah di wilayahnya; 2. berkoordinasi dengan Disdikprov mengenai sekolah sasaran yang dapat dididkpro secara luring dan terjangkau aksesnya; 3. Terkait dengan penambahan sasaran akibat perubahan kebijakan dengan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring; 4. Review LMS sebelum diklat daring, yaitu tanggal 11-13 Juli ; 5. Peserta yang berhalangan hadir akibat jarak yang jauh diganti dengan peserta dari provinsi yang sama; 6. Peserta digantikan oleh peserta yang telah mengikuti diklat daring sebelumnya; 7. Terkait sinkronisasi data berkoordinasi dengan direktorat terkait dan Disdikprov; 8. Melakukan revisi anggaran POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan IV capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada IKK 1.1 dalam Perjanjian Kinerja (PK Revisi) Eselon antara Dirjen Pendidikan Vokasi dan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tanggal 28 Desember Tahun 2022 sebesar 2215 Orang dengan ketercapaian akumulasi sampai dengan TW. IV sebesar 3215 orang atau 145,15% dari penetapan target kinerja yang telah disepakati. Namun pada revisi DIPA 03 Tanggal 22 April 2022 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendapat penambahan sasaran dan anggaran lewat dana BUN sebesar 805 orang untuk kepala sekolah, guru, dosen, dan instruktur dengan anggaran sebesar Rp. 29.577.159.000, penambahan ini belum masuk pada PK Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Jika sasaran target ini masuk ke PK Revisi maka target secara total seharusnya adalah 3020 orang dengan ketercapaian sebesar 3215 atau 106,46%. Untuk Capaian realisasi anggaran pada IKK ini dari total anggaran sebesar Rp. 44.421.197.000,- terserap Rp. 43.727.686.000,- atau sebesar 99,83% Adapun pada IKK 1.1 beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut : A. Pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan dunia kerja antara lain : 1. Telah terlaksananya Pendampingan Implementasi Pembelajaran (PIP) terhadap SMK di 6 Wilayah BBPPMPV Bispar yakni Prov. DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara yang dilaksanakan dalam jangka waktu periode Bulan Juli s.d Nopember 2022 ke 134 SMK PK dengan realisasi sebesar 938 orang. 2. Webinar Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penyusunan Capaian Pembelajaran bagi SMK yang diikuti oleh 752 SMK dari 6 wilayah binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. 3. Kunjungan Kerja Pimpinan UPT ke daerah yang telah ditentukan, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok, yang dihadiri oleh Pimpinan daerah setempat serta sekolah jalur mandiri berbagi dan mandiri berubah. 4. Monitoring dan Evaluasi. 5. penyusunan laporan Pendampingan Implementasi Pembelajaran. B. Pelatihan pengawas, kepala sekolah, guru kejuruan, instruktur dan dosen vokasi Antara Lain : 1. Pelatihan Manajerial Pengawas Sekolah yang telah dilakukan pada tanggal 14 s.d 20 Juli 2022 sebanyak 20 orang dengan realisasi 100%; 2. Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah sebanyak 100 orang pada tanggal 27 Juni sd 3 Juli 2022 dengan realisasi 100% untuk dana APBN dan Untuk dana BUN Program reskilling dan Upskilling dengan sasaran 133 Orang tercapain 132 orang. Total sasaran mkepalsa sekolah menjadi 233 orang dengan realisasi 232 orang; 3. Pelatihan peningkatan kompetensi Guru SMK secara tatap muka pada tanggal 27 Juni sd 3 Juli 2022 sebanyak 400 orang dengan realisasi 100%. sedangkan untuk dana BUN Program reskilling dan upskilling dengan sasaran 572 orang tercapai 573 orang. disini ada sisa anggaran yang kemudian di optimalisasi dari hasil efisiensi anggaran yang ada dilakukan pelatihan reskilling dan upskilling mencapai total 12 orang, untuk Pelatihan Peningkatan kompetensi guru secara daring dengan sasarrann 798 orang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli sd 5 Agustus 2022 dengan realisasi 880 orang atau 110,28%. Secara total sasaran yang ada pada target komponen guru pada PK revisi adalah 1338 org seharusnya dengan penambahan dana BUN sasaran pada PK revisi komponen pelatihan guru menjadi 1770 orang dengan total realisasi sebesar 1865 orang atau 105,37%; 4. Pelatihan bagi Tendik SMK bidang Bisnis dan Pariwisata. secara luring sebanyak 20 orang pada tanggal 14 sd 20 Juli 2022 terealisasi 100%; 5. Pelatihan kompetensi Dosen Vokasi padatanggal 14 sd 20 Juli 2022 sebanyak 20 orang terealisasi 100%; 6. Pelatihan Kompetensi bagi Instruktur Kursus dan Pelatihan sebanyak 20 orang pada tanggal 14 sd 20 Juli 2022 dengan realisasi 100%. Untuk kegiatan maupun pelatihan yang menggunakan anggaran dana BUN dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Rakortek Upskilling dan Reskilling Guru SMK yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 sd 29 Juli 2022 dengan jumlah 204 org; 2. Pelatihan Reskilling dan Upskilling bagi Guru Kejuruan SMK Bisnis dan Pariwisata yang dilakukan sebanyak 572 orang pada tanggal 8 Agustus sd 31 September 2022 terealisasi 100,17% atau 573 orang; 3. Pelatihan Upskilling dan Reskilling bagi Kepala Sekolah pada tanggal 15 sd 24 Agustus 2022 dengan peserta sebanyak 133 orang dengan realisasi 132 Orang; 4. Pelatihan Upskilling dan reskilling bagi Instruktur LKP Boga, Kecantikan, Busana dan Perpajakan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sd 24 Agustus 2022 dengan realisasi 100%; 5. Diklat Upskilling dan reskilling bagi Dosen PTV Boga dan UPW pada tanggal 15 Agustus sd 2 September 2022 sebanyak 50 pesertadengan realisasi 50 peserta; 6. Diklat Reskilling dan Upskilling hasil efisiensi dana BA BUN untuk dioptimalisasi sebanyak 12 Orang yang akan dilaksanakan di Bulan Oktober Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala dan Permasalahan yang dihadapi : 1. Jaringan internet di wilayah kalimantan agak sulit; 2. Transportasi lokal Sekolah di wilayah Kalimantan yang terbatas; 3. Revisi anggaran; 4. Menyesuaikan LMS prioritas dengan Kurikulum Merdeka; 5. Peserta mundur dikarenakan mengikuti kegiatan lain yang bersamaan di sekolah, mempunyai bayi atau balita dan tidak mendapatkan izin dari keluarga, mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Keterbatasan tenaga pengajar di Sekolah sehingga tidak diizinkan oleh Kepala Sekolah, jarak tempuh ke kota terlalu jauh dan dikarenakan sakit; 6. sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim Tendik; 7. sinkronisasi bank data Bispar dengan data sim PKB; 8. Kepala Sekolah Alumni perlu melakukan desiminasi terhadap sekolah sekitar; 9. Sekolah mengalami kesulitan melakukan MoU dengan Industri</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi dan Tindak Lanjut atas kendala yang dihadapi adalah : 1. berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke Sekolah di wilayahnya; 2. berkoordinasi dengan Disdikprov mengenai sekolah sasaran yang dapat dididkpro secara luring dan terjangkau aksesnya; 3. Terkait dengan penambahan sasaran akibat perubahan kebijakan dengan melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pendampingan secara luring dan daring; 4. Review LMS sebelum diklat daring, yaitu tanggal 11-13 Juli; 5. Terkait sinkronisasi data berkoordinasi dengan direktorat terkait dan Disdikprov; 6. Berkoordinasi dengan unit utama untuk melakukan revisi anggaran baik lewat DIPA, Kanwil dan POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Peserta digantikan oleh peserta yang telah mengikuti pelatihan Smart Training dan LULUS dengan nilai minimal Baik 8. Penyelenggara memfasilitasi peserta melakukan MoU/ PKS dengan industri tempat magang peserta dan melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak tersebut melalui Rakortek 9. Melakukan revisi POK sesuai tuntutan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

2	[SK 1.0] Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	811	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 811	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 800 TW4 : 1181	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sudah ada kebijakan terkait Perencanaan berbasis data (PBD) dan Bimtek PBD bagi petugas yang akan mendampingi sekolah untuk penjaminan mutu di sekolah dan perangkat sekolah</p> <p>Kendala / Permasalahan : Baru turunya kebijakan PBD dan baru selesainya bimtek pendampingan PBD sehingga baru dapat menyesuaikan program dengan kebijakan PBD untuk penjaminan mutu</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan persiapan dan koordinasi dalam pelaksanaan program PBD 2. Melakukan penjadwalan pendampingan PBD</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan II capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada IKK 1.2 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon antara Dirjen Pendidikan Vokasi dan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tanggal 28 Maret 2022 sebesar 811 Lembaga dengan ketercapaian 0% dengan alokasi anggaran Rp. 5.110.861.000,- dengan realisasi Rp. 1.639.311.000,- atau 32,08%. Pencapaian kinerja direncanakan akan tercapai pada semester II di Triwulan III dan IV.. Realisasi anggaran yang sudah terserap pada IKK ini dikarenakan ada beberapa tahapan pendukung terkait penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi dalam hal ini Perencanaan Berbasis Data (PBD) ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan pada antara lain: 1. Pada Triwulan sebelumnya sudah terlaksanan IHT Bimtek Tim PBD Bispar; 2. Pada Triwulan II ini adalah Sosialisasi PBD ke Pemerintah Daerah (6 Provinsi) pada Tanggal 20 sd 22 Juni 2022.. Pada semester II untuk triwulan III dan IV kegiatan yang akan dilakukan adalah : 1. Sosialisasi PBD ke Satuan Pendidikan SMK (6 Provinsi); 2. Pendampingan/Supervisi PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi. Periode Juli sd Agustus 2022. Adapun 6 wilayah binaan BBPPMPV Bispar yakni Provinsi DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Kalimantan Utara; 3. Movev Pelaksanaan PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi september sd Oktober 2022; 4. Penyusunan laporan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Bulan November 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala dan hambata yang dihadapi antara lain: 1. Perubahan program kegiatan penjaminan mutu menjadi perencanaan berbasis data, mengakibatkan perubahan penjadwalan yang telah ditetapkan pada awal tahun; 2. Terkendala dengan jaringan internet untuk sosialisasi ke SMK, wilayah kalimantan di pedalaman susah sinyal.; 3. Fasilitator BBPPMPV Bispar yang terbatas; 4. Fasilitator kurang memahami Perencanaan Berbasis Data sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam mengerjakan LK /output yang harus dihasilkan; 5. Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi belum memahami terkait Perencanaan Berbasis Data khususnya penggunaan Rapor Pendidikan dalam perencanaan daerah.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah 1. Berkoordinasi dengan Direktorat SMK terkait kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data; 2. Berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK SMK di wilayahnya; 3. Berkoordinasi dengan dit SMK untuk penambahan Fasilitator dari dit SMK untuk mengajar 4. Berkonsultasi dengan Tim Narasumber Perencanaan Berbasis Data dari Direktorat SMK, agar menghasilkan pemahaman yang sama; 5. Narasumber dari Tim Perencanaan Daerah Dit.SMK memberikan informasi terkait Perencanaan Berbasis Data bagi Pemerintah Daerah. Tim Penjaminan Mutu BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ikut mengawal pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis data sesuai provinsi yang menjadi tanggung jawabnya</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan III capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada IKK 1.2 dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon antara Dirjen Pendidikan Vokasi dan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tanggal 28 Maret 2022 sebesar 811 Lembaga dengan ketercapaian 98,64% atau 800 Lembaga teralisasi dengan alokasi anggaran Rp. 5.110.861.000,- dengan realisasi Rp. 4.875.261.000,- atau 95,39%. Realisasi anggaran yang sudah terserap pada IKK ini dikarenakan ada beberapa tahapan pendukung terkait penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi dalam hal ini Perencanaan Berbasis Data (PBD) ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan pada Triwulan sebelumnya antara lain: 1. IHT Bimtek Tim PBD Bispar Sosialisasi PBD ke Pemerintah Daerah (6 Provinsi) pada Tanggal 20 sd 22 Juni 2022. Pada semester II untuk triwulan ini kegiatan yang sudah dilakukan adalah : 1. Sosialisasi PBD ke Satuan Pendidikan SMK (6 Provinsi) pada tanggal 7 sd 8 Juli 2022; 2. Pendampingan/Supervisi PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi. Periode Juli sd Oktober 2022 secara luring ke 6 wilayah binaan BBPPMPV Bispar yakni Provinsi DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Kalimantan Utara sebanyak 150 SMK ; 3. Pendampingan PBD secara daring ke sekolah yang belum didampingi secara luring, yakni 1.031 SMK. rencananya akan dilakukan pada Triwulan IV, 4. Movev Pelaksanaan PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi dilaksanakan pada bulan Oktober 2022; 4. Penyusunan laporan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Bulan November 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala dan hambata yang dihadapi antara lain: 1. Perubahan program kegiatan penjaminan mutu menjadi perencanaan berbasis data, mengakibatkan perubahan penjadwalan yang telah ditetapkan pada awal tahun; 2. Terkendala dengan jaringan internet untuk sosialisasi ke SMK, wilayah kalimantan di pedalaman susah sinyal.; 3. Fasilitator BBPPMPV Bispar yang terbatas; 4. Fasilitator kurang memahami Perencanaan Berbasis Data sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam mengerjakan LK /output yang harus dihasilkan; 5. Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi belum memahami terkait Perencanaan Berbasis Data khususnya penggunaan Rapor Pendidikan dalam perencanaan daerah. 6. SMK sasaran pendampingan memiliki akses transportasi yang sulit.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah 1. Berkoordinasi dengan Direktorat SMK terkait kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data; 2. Berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK SMK di wilayahnya; 3. Berkoordinasi dengan dit SMK untuk penambahan Fasilitator dari Dit. SMK untuk pendampingan 4. Berkonsultasi dengan Tim Narasumber Perencanaan Berbasis Data dari Direktorat SMK, agar menghasilkan pemahaman yang sama; 5. Narasumber dari Tim Perencanaan Daerah Dit.SMK memberikan informasi terkait Perencanaan Berbasis Data bagi Pemerintah Daerah. Tim Penjaminan Mutu BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ikut mengawal pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis data sesuai provinsi yang menjadi tanggung jawabnya; 6. Berkoordinasi dengan disdikprov terkait transportasi menuju sekolah sasaran</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan IV capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada IKK 1.2 dalam Perjanjian Kinerja (PK Revisi) Eselon antara Dirjen Pendidikan Vokasi dan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada Tanggal 28 Desember 2022 sebesar 811 Lembaga dengan ketercapaian 145,62% atau 1181 Lembaga teralisasi dengan alokasi anggaran Rp. 5.110.861.000,- dengan realisasi Rp. 5.110.811.000,- atau hampir 100 %. Realisasi anggaran yang sudah terserap pada IKK ini dikarenakan ada beberapa tahapan pendukung terkait penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi dalam hal ini Perencanaan Berbasis Data (PBD) ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan pada Triwulan sebelumnya antara lain: 1. IHT Bimtek Tim PBD Bispar Sosialisasi PBD ke Pemerintah Daerah (6 Provinsi) pada Tanggal 20 sd 22 Juni 2022; 2. Sosialisasi PBD ke Satuan Pendidikan SMK (6 Provinsi) pada tanggal 7 sd 8 Juli 2022; 3. Pendampingan/Supervisi PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi. Periode Juli sd Oktober 2022 secara luring ke 6 wilayah binaan BBPPMPV Bispar yakni Provinsi DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Kalimantan Utara sebanyak 150 SMK ; 4. Pendampingan PBD secaradaring ke sekolah yang belum didampingi secara luring, yakni 1.031 SMK; 5. Movev Pelaksanaan PBD ke Pemda dan SMK di 6 Provinsi dilaksanakan pada bulan Oktober 2022; 6. Penyusunan laporan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Bulan Desember 2022.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Perubahan program kegiatan penjaminan mutu menjadi perencanaan berbasis data, mengakibatkan perubahan penjadwalan yang telah ditetapkan pada awal tahun; 2. Terkendala dengan jaringan internet untuk sosialisasi ke SMK, wilayah kalimantan di pedalaman susah sinyal.; 3. Fasilitator BBPPMPV Bispar yang terbatas; 4. Fasilitator kurang memahami Perencanaan Berbasis Data sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam mengerjakan LK /output yang harus dihasilkan; 5. Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi belum memahami terkait Perencanaan Berbasis Data khususnya penggunaan Rapor Pendidikan dalam perencanaan daerah.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan Direktorat SMK terkait kegiatan pendukung dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data; 2. Berkoordinasi dengan disdikprov, korwas dan MKKS di wilayah binaan agar dapat mensosialisasikan ke SMK SMK di wilayahnya; 3. Berkoordinasi dengan dit SMK untuk penambahan Fasilitator dari dit SMK untuk mengajar; 4. Berkonsultasi dengan Tim Narasumber Perencanaan Berbasis Data dari Direktorat SMK, agar menghasilkan pemahaman yang sama; 5. Narasumber dari Tim Perencanaan Daerah Dit.SMK memberikan informasi terkait Perencanaan Berbasis Data bagi Pemerintah Daerah. Tim Penjaminan Mutu BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ikut mengawal pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis data sesuai provinsi yang menjadi tanggung jawabnya</p>
3	[SK 1.0] Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	2	TW1 : 0 TW2 : 2 TW3 : 2 TW4 : 2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 2 TW4 : 2	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Petunjuk teknis model pembelajaran dalam proses pembuatan dan belum disahkan</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada juknis sehingga program belum bisa berjalan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Membuat draft program model pembelajaran dan menunggu juknis disahkan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sudah Tersusun draft model pembelajaran</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum finalnya pedoman umum inovasi dan model pembelajaran dari Dit Mitras Dudi sehingga finalisasi model pembelajaran masih menunggu pedoman umum</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan Koordinasi dengan Dit. Mutras DUDI terkait pedoman umum inovasi dan model pembelajaran</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Realisasi anggaran sudah terserap pada indikator kinerja ini sebesar 99,79% dari alokasi anggaran namun model yang dihasilkan baru berupa Draft Final model Pembelajaran.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum finalnya pedoman umum inovasi dan model pembelajaran dari Dit Mitras Dudi sehingga finalisasi model pembelajaran masih menunggu pedoman umum</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan Koordinasi dengan Dit. Mutras DUDI terkait pedoman umum inovasi dan model pembelajaran dan direncanakan selesai penyempurnaan Model Pembelajaran pada workshop model pada Bulan Nopember Tahun 2022</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran TEFA dan PPK. Dari laporan bantuan teafa dan ppk thn kemarin dipilih praktik baik dr sklh sklh penerima bantuan dimasukkan ke dalam buku model pembelajaran teafa dan model pembelajaran ppk thn ini, stlh draft buku disusun diuji keterbacaan oleh kadep dan sekdep departemen, tim pengembang teafa dan ppk serta penanggung jawab teafa dan ppk di sekolah, draft final buku teafa dan ppk sdh ada dan skoring instrumen keterbacaan teafa dan ppk sdg berlangsung dan akan selesai minggu ini. Pada Kegiatan Pendampingan kemitraan digunakan sekaligus sebagai uji keterbacaan model pembelajaran teafa dan ppk Krn sekolah pusat belajar sebagai mitra bispar juga sudah berhasil dalam menerapkan teafa dan ppknya</p> <p>Kendala / Permasalahan : Terkendala rentang waktu yang singkat dalam penyusunan model</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Menentukan rentang waktu yang lebih lama untuk tahun depan</p>
4	[SK 2.0] Meningkatkan tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	TW1 : 0 TW2 : - TW3 : - TW4 : A	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : capaian output IKK baru akan tercapai setelah tahun anggaran Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dan permasalahan yang dihadapi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi dan tindak lanjut karena tidak ada kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun lembaga akan terus berkoordinasi dengan unit unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian untuk mendapatkan Bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan A dapat tercapai atau melebihi dari target yang ditetapkan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Capaian output IKK baru akan tercapai setelah tahun anggaran 2021pada Tahun 2022 dengan hasil penilaian oleh biro perencanaan meliputi beberapa komponen, antara lain : 1. Komponen Perencanaan 2.Komponen Pengukuran Kinerja 3. Komponen Pelaporan Kinerja 4. Komponen Evaluasi Kinerja 5. Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Untuk tahun 2021 hasil Predikat SAKIP Berdasarkan Evaluasi Tahun Anggaran 2021 dan Perencanaan tahun 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dokumen kelengkapan evaluasi saki yang belum sesuai dengan kualitas penilaian</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan BB dapat tercapai ataupun melebihi dari target yang ditentukan 2. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi saki dan pendukung 3. Melakukan evaluasi mandiri</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Capaian output IKK ini meliputi penilaian beberapa komponen, antara lain : 1. Komponen Perencanaan 2.Komponen Pengukuran Kinerja 3. Komponen Pelaporan Kinerja 4. Komponen Evaluasi Kinerja 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Untuk tahun 2022 hasil Predikat SAKIP Berdasarkan Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dengan Biro Perencanaan kemdikbudristek memperoleh nilai sementara 83,65 (Kategori A) dan hasil final masih menunggu hasil Evaluasi SAKIP dari Itjen Kemdikbudristek untuk Hasil Final SAKIP Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Dokumen kelengkapan evaluasi saki yang belum sesuai dengan kualitas penilaian; 2. Belum ada Inovasi yang dilakukan dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan A dapat tercapai; 2. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi saki dan pendukung 3. Melakukan evaluasi mandiri 4. Melakukan inovasi dalam pengumpulan data kinerja maupun pengukuran kinerja</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Capaian output IKK ini meliputi penilaian beberapa komponen, antara lain : 1. Komponen Perencanaan 2.Komponen Pengukuran Kinerja; 3.Komponen Pelaporan Kinerja; 4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal; Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Untuk tahun 2022 hasil Predikat SAKIP Berdasarkan Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dengan Biro Perencanaan dan Itjen kemdikbudristek memperoleh nilai final 83,65 (Kategori A)</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Dokumen kelengkapan evaluasi saki yang belum sesuai dengan kualitas penilaian; 2. Belum ada Inovasi yang dilakukan dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait seperti Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendapatkan bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan A dapat tercapai; 2. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen evaluasi saki dan pendukung 3. Melakukan evaluasi mandiri 4. Melakukan inovasi dalam pengumpulan data kinerja maupun pengukuran kinerja secara bertahap agar bisa disajikan pada LKE SAKIP 2023</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	93.50	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : 93.50	TW1 : 0 TW2 : - TW3 : - TW4 : 95.99	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian output IKK baru akan tercapai setelah tahun anggaran tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Tidak ada kendala dan Permasalahan yang dihadapi Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada strategi dan tindak lanjut karena tidak ada kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun lembaga akan terus berkoordinasi dengan unit-unit terkait baik internal maupun eksternal seperti Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai unit utama dalam evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam penilaian indikator kinerja anggaran (IKPA) untuk mendapatkan Bimbingan dan asistensi agar target yang ditetapkan 93,50 dapat tercapai ataupun melebihi dari target yang ditetapkan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Output ketercapaian kinerja ini baru akan tercapai pada akhir tahun dengan berakhirnya semua proses kegiatan. kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target ini adalah : 1. Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala untuk mengantisipasi ketercapaian lebih memuaskan baik nilai IKPA dan EKA 2. melakukan evaluasi kinerja pertrwulan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Kendala / Permasalahan : 1. Adanya Blokir Automatic Adjustment AA pada belanja pegawai sebesar Rp. 5.640.452.000,- dan belanga barang sebesar Rp. 200.000.000,- yang berbias pada serapan anggaran 2. Ada Revisi penambahan anggaran dan sasaran DIPA lewat penambahan anggaran dana BUN 3. Adanya revisi belanja pegawai antar satker ditingkat unit utama Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi adalah 1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait yakni Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar tidak mengganggu penilaian IKPA dalam melakukan revisi, baik revisi buka blokir AA, Penambahan anggaran dan sasaran ataupun revisi perpindahan antar satker dibawah Ditje Diksi; 2. Melakukan revisi jadwal kegiatan terkait dengan penambahan anggaran BUN agar kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik; 3. melakukan revisi POK internal sesuai kebutuhan lembaga dan melakukan pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan pengisian aplikasi spsikita baik menu simproka dan kinerja dengan tepat waktu</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Output ketercapaian indikator kinerja ini baru akan tercapai pada akhir tahun dengan berakhirnya semua proses kegiatan. kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target ini adalah : 1. Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mendorong nilai NKA lebih baik dari penilaian EKA seperti Bobot Penyerapan, Bobot Konsistensi, Bobot Capaian Rincian Output dan Bobot Efisiensi maupun penilaian IKPA 2. Melakukan evaluasi kinerja per trwulan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Kendala / Permasalahan : 1. Adanya Blokir Automatic Adjustment AA belanga barang sebesar Rp. 200.000.000,- yang berbias pada serapan anggaran pada akhir serapan tahun 2022; 2. Adanya revisi belanja pegawai antar satker dalam satu unit utama yang belum selesai hingga Triwulan III membuat revisi satker (POK) menjadi tertunda. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi adalah 1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait yakni Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar revisi buka blokir AA sebesar Rp. 200.000.000,- dapat dibuka atau dihilangkan agar tidak menjadi indikator penghambat pencapaian serapan Tahun 2022 secara maksimal; 2. Melakukan koordinasi dengan unit utama agar revisi Hal. III pada Triwulan IV pada awal Bulan Oktober dapat terlaksana untuk mendorong penilaian IKPA agar NKA Tahun 2022 lebih maksimal. 3 Melakukan revisi POK internal sesuai kebutuhan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan pengisian aplikasi spsikita baik menu simproka dan kinerja dengan tepat waktu</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Semua proses kegiatan. kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target ini adalah : 1. Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mendorong nilai NKA lebih baik dari penilaian EKA seperti Bobot Penyerapan, Bobot Konsistensi, Bobot Capaian Rincian Output dan Bobot Efisiensi maupun penilaian IKPA 2. Melakukan evaluasi kinerja per trwulan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Dengan usaha yang dilakukan NKA yang dihasilkan pada Tahun ini sebesar 95.99 melebihi target yang ditetapkan yaitu 93.50 Kendala / Permasalahan : Revisi Anggaran baik buka blokir AA, penambahan dana bun, revisi kelebihan belanja pegawai ditingkat unit utama menjadi salah satu indikator ketercapaian nilai IKPA tidak maksimal diantaranya konsistensi penyerapan dan revisi hal III DIPA Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait yakni Ditjen Pendidikan Vokasi dan Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar dalam revisi dikemudian hari tidak mengganggu atau tidak bersamaan dengan revisi hal III di Kanwil DJPB; 2. Melakukan revisi POK internal sesuai kebutuhan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Melakukan pengisian aplikasi spsikita baik menu simproka dan kinerja dengan tepat waktu</p>
---	--	--	-------	-------	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	17.0000	Kesepakatan	0	0	21	21	Rp. 858.678.000
2	[052] Satuan Pendidikan Vokasi yang bermitra dengan Dunia Kerja			0	0	21	21	Rp. 738.660.000
3	[053] Pendampingan link and match Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja			0	0	1	1	Rp. 120.018.000
4	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	811.0000	Lembaga	0	0	903	1284	Rp. 5.110.861.000
5	[051] Pembinaan dalam rangka Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi			0	0	1	1	Rp. 2.117.321.000
6	[053] Pendampingan Satuan Pendidikan Vokasi			0	0	903	1284	Rp. 2.993.540.000
7	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	837.0000	Orang	0	998	998	998	Rp. 4.186.914.000
8	[053] Pelatihan Guru Sasaran			0	998	998	998	Rp. 2.354.610.000
9	[054] Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum			0	0	0	1	Rp. 1.832.304.000
10	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	2043.0000	Orang	0	454	2579	2649	Rp. 36.221.699.000
11	[051] Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah			0	0	232	232	Rp. 5.858.689.000
12	[052] Pelatihan Manajerial Pengawas			0	0	20	20	Rp. 298.124.000
13	[053] Pelatihan Guru Kejuruan			0	218	2275	2287	Rp. 29.399.484.000
14	[055] Pelatihan Laboran Teknisi Administrasi - PNB			0	2	2	3	Rp. 368.871.000
15	[056] Pelatihan Laboran Teknisi Administrasi			0	0	20	20	Rp. 296.531.000
16	Dosen yang mendapatkan pelatihan kompetensi berbasis kerjasama industri	70.0000	Orang	0	0	70	70	Rp. 2.205.892.000
17	[051] Pelatihan Kompetensi Vokasi			0	0	70	70	Rp. 564.622.000
18	[052] Uji Kompetensi Keahlian Berbasis Industri			0	0	1	1	Rp. 49.600.000
19	[053] Magang di Industri On The Job Training			0	0	1	1	Rp. 1.591.670.000
20	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	70.0000	Orang	0	0	70	70	Rp. 1.806.692.000
21	[051] Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kejuruan			0	0	70	70	Rp. 1.806.692.000
22	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	2.0000	model	0	0	2	2	Rp. 260.571.000
23	[052] Model Project Base Learning			0	2	2	2	Rp. 260.571.000
24	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0	0.75	0.85	1	Rp. 2.197.556.000
25	[051] Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran			3	6	9	12	Rp. 852.762.000
26	[052] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan			4	6	9	12	Rp. 224.772.000
27	[054] Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan			3	6	9	12	Rp. 224.772.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

28	[058] Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai			2	6	9	12	Rp. 895.250.000
29	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0	0.836	0.912	1.4	Rp. 39.714.507.000
30	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	14	Rp. 24.885.901.000
31	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 14.828.606.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 92.563.370.000

Depok, 10 Januari 2023

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata,



Sabli

